



**PERJANJIAN *THE NEW START* ANTARA AMERIKA
SERIKAT DAN RUSIA**

***THE TREATY OF THE NEW START BETWEEN UNITED STATES OF
AMERICA AND RUSSIA***

Skripsi

Diajukan sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar sarjana

Oleh
Tegar Aditya
Nim 120910101092

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis;
2. Nabi Muhammad S.A.W. beserta para sahabat yang telah menuntun hidup penulis dengan berpedoman pada agama Islam;
3. Ibunda Yuliati Aditorini dan Ayahanda Mochammad Safi'ie atas dorongan, motivasi serta doanya demi kelancaran hidup dan studi penulis;
4. Hikmah milandari atas kesabaran dan dukungan selama ini;
5. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Kesempatan untuk menemukan kekuatan yang lebih baik dalam diri kita muncul
ketika hidup terlihat sangat menantang”

Joseph Campbell¹



¹ Joseph Campbell & Bill Moyers. 2011. *The Power of Myth*. New York : Anchor Double day.
Hlm 21

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tegar Aditya

NIM : 120910101092

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “PERJANJIAN THE NEW START ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN RUSIA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2017

Yang menyatakan,

Tegar Aditya

NIM 120910101092

SKRIPSI

**PERJANJIAN THE NEW START ANTARA AMERIKA
SERIKAT DAN RUSIA**

Oleh
Tegar Aditya
NIM 120910101092

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum
Dosen Pembimbing Anggota : Fuat Albayumi, S.IP,MA

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PERJANJIAN *THE NEW START* ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN RUSIA**” telah di uji dan di sahkan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Juni 2017
Waktu : 13.00
Tempat : Ruang LKPK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Team Penguji

Ketua

Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D

196402081989021001

Sekretaris I

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum

195904231987021001

Sekretaris II

Fuat Albayumi, S.IP, MA

197404242005011002

Anggota I

Drs. Agung Purwanto, M.Si

196810221993031002

Anggota II

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos, M.Si

197812242008122001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si

195808101987021002

RINGKASAN

PERJANJIAN *THE NEW START* ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN RUSIA; Tegar Aditya ; 120910101092; 2017; 107 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penandatanganan *The New Strategic Arms Reduction Treaty (The New START)* tertanggal 8 April 2010 di Praha merupakan babak baru dari mereset hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian *The New START* yang memiliki nama resmi *Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms* merupakan perjanjian yang terbentuk dan dilatarbelakangi oleh kesadaran akan bahaya nuklir sehingga dibutuhkan *arm control* antara Amerika Serikat dan Rusia terutama dibidang persenjataan nuklir strategis. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari rezim perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian *START I* dan *Moscow Treaty (SORT)*. Oleh karena itu perjanjian ini memiliki dua tujuan utama yang sama yaitu pengurangan persenjataan nuklir strategis (*disarmament*) dan pemantauan serta verifikasi. Perjanjian *The New START* diharapkan bisa menjadi suksesor dari rezim perjanjian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauhmana efektivitas perjanjian *The New START* dalam memantau dan mengurangi jumlah kepemilikan senjata nuklir strategis.

Metode penelitian ini menggunakan metode *literature research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan media cetak maupun online. Data - data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas rezim internasional yang dikemukakan oleh Arild Underdal. Dalam teori rezim internasional tersebut penentuan nilai efektivitas rezim perjanjian *The New START* dapat dilihat melalui analisis variabel Independen dan variabel dependen. Variabel independen berupa kualitas hubungan yang dianalisis dengan indikator *problem malignancy* dan mekanisme *problem solving*. Kualitas hubungan antar aktor akan mempengaruhi variabel dependen yaitu *output, outcome* dan *impact*. Nilai *output, outcome* dan *impact* kemudian dianalisis dengan formula $Er = f (Sr.Cr) + Br$. Nilai efektifitas

(*Er*) didapat dari terpenuhinya *output* (*Sr*), *outcome* (*Cr*), dan *impact* (*Br*). Hasil dari formula ini kemudian menentukan nilai efektifitas dari rezim perjanjian *The New START*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim perjanjian *New START* dapat dikatakan efektif dalam memenuhi tujuan utamanya yaitu mampu mengurangi persenjataan nuklir strategis serta mengimplementasikan transparansi melalui pemantauan dan verifikasi. Hubungan kedua belah pihak berjalan dinamis namun cenderung *benign*. Hingga 2017 tidak ada masalah yang rumit (*problem malignancy*) yang terjadi. Semua isu terkait perjanjian dapat diselesaikan dengan mekanisme *problem solving* yang baik. Pada akhirnya permasalahan rumit yang dapat menimbulkan perpecahan (*cumulative cleavage*) tidak terjadi. Tidak adanya *problem malignancy* dan baiknya mekanisme *problem solving* kemudian berpengaruh positif terhadap nilai efektifitas perjanjian. Formula $E_r = f(S_r, C_r) + B_r$ dalam rezim perjanjian terpenuhi dengan nilai variabel dependen yang positif. Perjanjian *New START* berhasil menjadi rangkaian perjanjian yang resmi dan diratifikasi oleh Amerika Serikat dan Rusia serta diikuti dengan langkah-langkah domestik untuk mematuhi aturan perjanjian (*output level dua*), rezim perjanjian juga mampu mengubah perilaku Amerika Serikat dan Rusia (*outcome*), dan memiliki dampak (*impact*) yang bernilai positif dalam perjanjian *New START* sehingga selaras dengan tujuan utama. Rezim Perjanjian *New START* mampu mengikat Amerika Serikat dan Rusia guna mengurangi persenjataan strategisnya dan mengimplementasikan aturan pemantauan serta verifikasi sesuai dengan aturan perjanjian, bahkan mampu mempengaruhi negara NWS lainnya untuk melakukan pengurangan persenjataan, menerapkan transparansi, dan memperkuat rezim NPT.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN THE NEW START ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN RUSIA”**. Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional dan Ibu Dra. Sri Yuniati, M.si selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional,
3. Bapak Drs. M. Nur Hasan, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Fuat Albayumi, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membantu penulis menyusun skripsi selama ini;
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi karya tulis yang bermanfaat.

Jember, 16 Juni 2017

Penulis

DAFTAR SINGKATAN

ABM : Anti Ballistic Missile

NPT : Non Proliferation Treaty

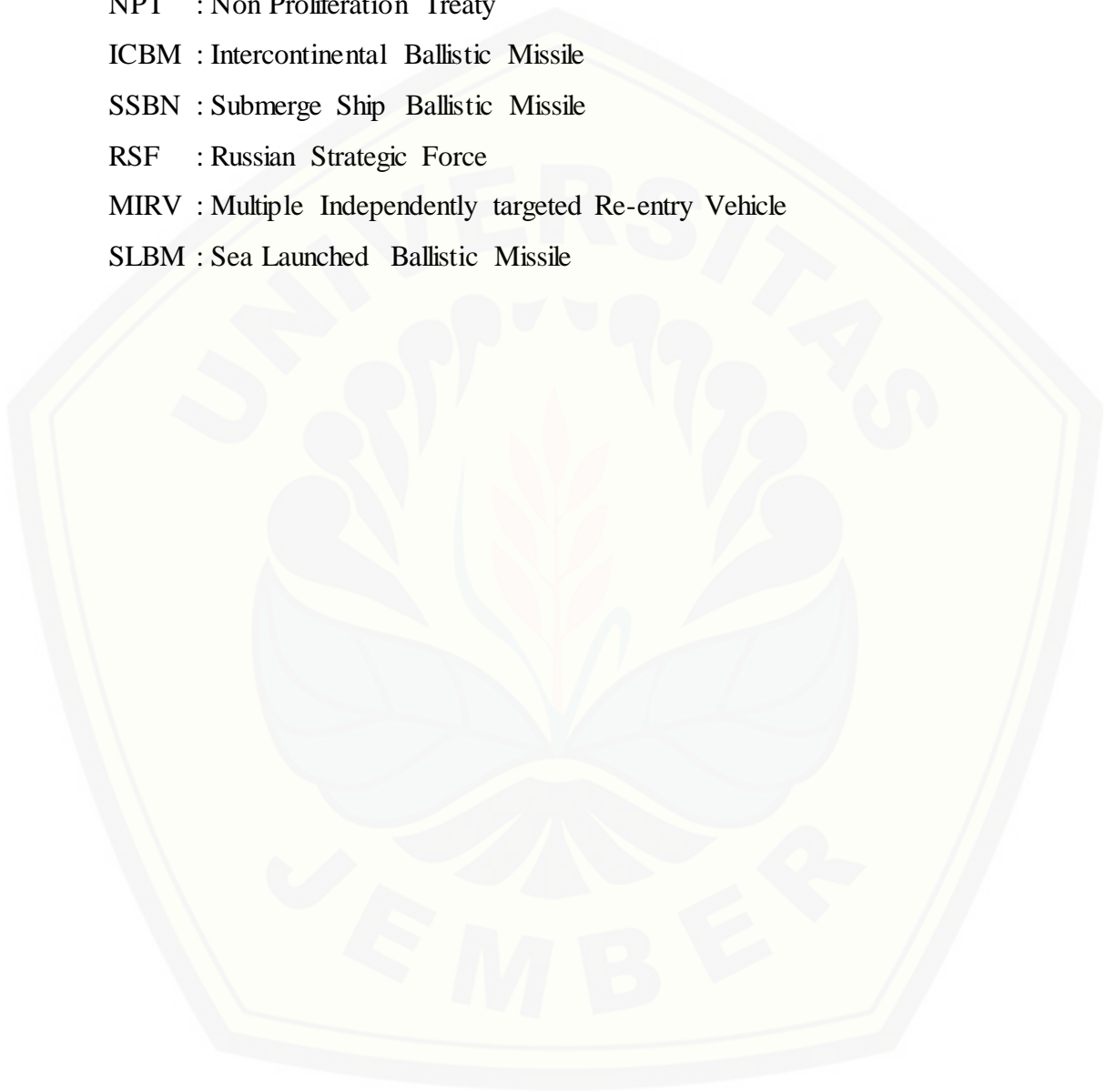
ICBM : Intercontinental Ballistic Missile

SSBN : Submerge Ship Ballistic Missile

RSF : Russian Strategic Force

MIRV : Multiple Independently targeted Re-entry Vehicle

SLBM : Sea Launched Ballistic Missile



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1. Efektivitas Rezim.....	23
4.2. Nuklir di dunia.....	97



DAFTAR GRAFIK

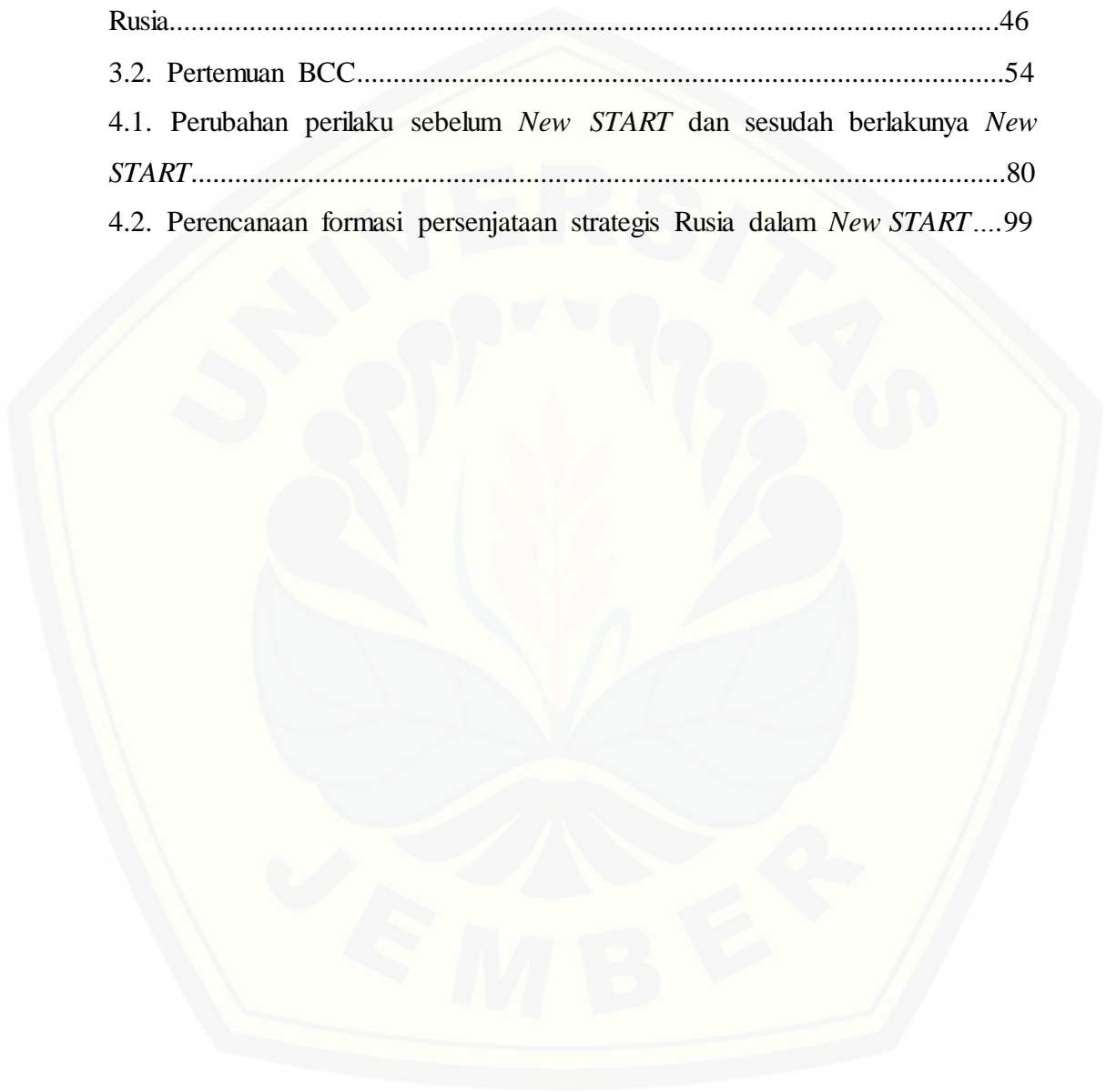
Halaman

3.1. Perkembangan jumlah kepemilikan persenjataan strategis.....47



DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1. Tabel Upaya modernisasi, konversi, dan eliminasi Amerika Serikat dan Rusia.....	46
3.2. Pertemuan BCC.....	54
4.1. Perubahan perilaku sebelum <i>New START</i> dan sesudah berlakunya <i>New START</i>	80
4.2. Perencanaan formasi persenjataan strategis Rusia dalam <i>New START</i>	99



DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	i
MOTO	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1. Batasan Materi	7
1.2.2. Batasan Waktu	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Landasan Teori	8
1.6. Argumen Utama	16
1.7. Metode Penelitian	17
1.7.1. Teknik Pengumpulan Data	17
1.7.2. Teknik analisis data	18
1.8. Sistematika penulisan	18
BAB 2. ISI PERJANJIAN THE NEW START	20
2.1. Pengurangan Kepemilikan Persenjataan	24

2.2. Pemantauan dan Verifikasi.....	31
2.3. Komisi Permusyawaratan Bilateral atau Bilateral Consultative Commission (BCC)	39
BAB 3. IMPLEMENTASI PERJANJIAN THE NEW START	43
3.1. Pengurangan Kepemilikan Persenjataan	46
3.2. Pemantauan dan Verifikasi	52
3.3. Komisi Permusyawaratan Bilateral atau Bilateral Consultative Commission (BCC)	54
BAB 4. EFEKTIVITAS REZIM PERJANJIAN <i>THE NEW START</i>.....	58
4.1. Dinamika Hubungan Amerika Serikat dan Rusia.	58
4.2. Mekanisme pemecahan masalah dalam Rezim <i>New START</i>	66
4.3. Nilai Efektifitas Rezim perjanjian	71
BAB 5. KESIMPULAN	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi persenjataan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan tersebut memang diharapkan oleh negara-negara maju untuk memperkuat pengaruh dalam kedudukan internasional. Kepemilikan persenjataan yang mutakhir dan berjumlah banyak akan membuat suatu negara disegani dan dihormati, karena kepemilikan persenjataan menjadi salah satu faktor penentu power suatu negara di mata internasional. Pandangan tersebut mendorong banyak negara untuk berlomba – lomba untuk memiliki persenjataan yang mutakhir terlebih lagi dalam kepemilikan senjata nuklir, senjata yang sangat di takuti dan memiliki daya hancur yang luar biasa.

Bermula pada saat perang dunia kedua, ketika dunia menjadi saksi sejarah betapa dahsyatnya peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang telah menorehkan catatan hitam dalam sejarah peradaban manusia sekaligus menjadi peristiwa yang menakutkan di mata dunia internasional. Bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki merupakan bom yang termasuk dalam kategori senjata nuklir dimana reaksi pelepasan atom yang kemudian menciptakan daya ledak luar biasa tersebut merupakan salah satu dari prinsip kerja nuklir. Kedahsyatan bom atom Hiroshima dan Nagasaki memberikan derita berkepanjangan bagi rakyat Jepang sekaligus mampu menghentikan perang dunia kedua, sayangnya walau perang dunia kedua berakhir perkembangan dan perlombaan kepemilikan senjata nuklir tidaklah berhenti.

Pasca pemboman Hiroshima dan Nagasaki Amerika Serikat memperkenalkan program atom untuk kedamaian (*Atoms for Peace*) yang merupakan bentuk reaksi dalam menanggapi rasa ketakutan masyarakat dunia terhadap senjata nuklir yang di anggap sebagai senjata pemusnah masal. Pada tanggal 8 Desember 1953 dalam rapat pleno Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) yang ke-470, Presiden Dwight D.Eisenhower menyatakan:

“The United States knows that if the fearful trend of atomic military build-up can be reversed, this greatest of destructive forces can be developed into a great boon, for the benefit of all mankind. The United States knows that peaceful power from atomic energy is no dream of the future. The capability already proved, is here today. Who can doubt that, if the entire body of the world's scientists and engineers had adequate amounts of fissionable material with which to test and develop their ideas, this capability would rapidly be transformed into universal, efficient and economic usage.”²

Menurut pendapatnya pengetahuan tentang nuklir haruslah di bagikan kepada sesama untuk kedamaian, namun pemanfaatan nuklir haruslah positif seperti menggunakan reaktor nuklir untuk pembangkit listrik dan penggunaan yang efektif serta bernilai ekonomis yang memudahkan hidup masyarakat. Ironisnya, prediksi akan tujuan dari pernyataan Dwight D.Eisenhower meleset. Program atom untuk kedamaian malah menjadi latar belakang menyebarnya teknologi nuklir ke banyak negara, hal ini disebabkan karena Amerika Serikat dan Rusia memberikan reaktor nuklir kepada negara - negara aliansinya. Meskipun tujuan pemberian reaktor nuklir tersebut bertujuan baik namun hanya butuh sedikit modifikasi dari pengetahuan nuklir yang dibagikan untuk membuat sebuah senjata nuklir. Menyadari akan kondisi tersebut, tercetuslah *Nuclear Non-Proliferation Treaty*³, perjanjian ini bertujuan untuk mencegah penyebaran teknologi senjata nuklir. Selain itu, perjanjian juga menetapkan sistem pengamanan di bawah tanggung jawab Badan Energi Atom Internasional atau *Internasional Atomic Energy Agency (IAEA)*. Selain itu, isu nuklir tidak berhenti terpaku pada penyebaran teknologinya saja, demi menjaga keseimbangan dan kedamaian dunia maka dibutuhkan pengurangan senjata nuklir dan senjata strategis. Senjata strategis adalah segala bentuk senjata yang secara umum memiliki jangkauan antar benua (*intercontinental coverage*). Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah perjanjian pengurangan senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Rusia karena kedua negara ini merupakan negara pemilik

²Internasional Atomic Energy Agency. 1953. *Atoms for peace speech*. <http://www.iaea.org/about/history/atoms-for-peace-speech> [24 juli 2016]

³ United Nations Document. 2010. *U. S. DELEGATION to the 2010 Nuclear NONPROLIFERATION TREATY REVIEW CONFERENCE*. New York : United State Secretary Office. Hlm 32

senjata nuklir terbanyak yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia namun memiliki hubungan yang kurang harmonis.

Perjanjian demi perjanjian dilakukan tidak luput dari berbagai perbaikan dan pembaharuan yang menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan kepentingan kedua negara, serta menutup celah-celah kelemahan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Dalam sejarahnya, pembatasan senjata nuklir dan senjata strategis pertama kali dibahas dalam *Strategic Arms Limitation Talks I (SALT I)*. Dalam *SALT I* berbagai pembicaraan dan negosiasi dilakukan oleh Amerika Serikat dan Russia, dimulai sejak 1969 sampai 1972. Namun, dalam proses negosiasinya terdapat ketidak simetrisan persenjataan dimana jumlah *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)* Russia meningkat melebihi Amerika Serikat sedangkan Amerika Serikat juga mengembangkan *Multiple Independently Re-entry Vehicle (MIRV)* yang menjadikan satu misil mampu membawa lebih dari satu *warheads*⁴ dengan target yang berbeda pula. Pada akhirnya negosiasi *SALT I* kemudian mengarah pada ditandatanganinya perjanjian *Anti Ballistic Missile treaty (ABM)* dan perjanjian sementara (*interim agreement*) untuk membatasi senjata strategis. Pada akhir 1972, perbincangan pembatasan senjata strategis berlanjut memasuki *Strategic Arms Limitation Talks II (SALT II)* hingga 1979. Tujuan utama *SALT II* adalah melanjutkan *interim agreement* dan menjadikannya perjanjian resmi jangka panjang. Namun *SALT II* tidak diratifikasi oleh Amerika Serikat karena Rusia menginvasi Afghanistan dan Amerika Serikat mengetahui adanya penempatan pasukan Rusia di Kuba sehingga menyebabkan hubungan Amerika Serikat dan Rusia tidak harmonis. Perkembangan selanjutnya baru dimulai lagi pada tahun 1991 dalam perjanjian *Strategic Arms Reduction Treaty (START I)*. Perjanjian *START I* mengatur pembatasan maksimal 6000

⁴ *Warhead* merupakan hulu ledak atau bagian dari misil, proyektil, roket, atau amunisi lainnya yang mana di dalamnya mengandung unsur penghancur baik nuklir atau thermonuklir, peledak berdaya besar, unsur kimia atau biologi, dan bahan-bahan lain yang sengaja digunakan untuk tujuan merusak. Department of Defense Joint Doctrine Division. 2007. *Dictionary of Military and Associated Terms*. <http://www.military-dictionary.org/International-Relations-and.../warhead> [1 Agustus 2016].

warheads pada *deployed ICBMs*⁵, *deployed SLBMs*⁶, dan *deployed heavy bomber*⁷ serta membatasi 1600 *launchers*⁸. Perjanjian *START I* berlaku sampai 5 Desember 2009. Pada selang berlakunya *START I* Amerika Serikat dan Rusia juga membahas *Strategic Arms Reduction Treaty II (START II)* pada tahun 1993. Perjanjian ini melarang penggunaan *MIRV* dalam *ICBM*, namun *START II* tidak berhasil karena pada 2002 Rusia menarik diri dari perjanjian sebagai respon terhadap penarikan diri Amerika Serikat dari perjanjian *ABM*. Gagalnya *START II* melahirkan *Strategic Offensive Reduction Treaty (SORT)* pada tahun 2002. *SORT* membatasi jumlah kepemilikan *warheads* sejumlah 1700-2200. *SORT* berlaku mulai 2003-2011. Selanjutnya pada tahun 2010, menanggapi akan masa kadaluarsa *START I* yang berakhir pada 5 Desember 2009, Amerika dan Rusia membuat perjanjian yang baru yaitu *New Strategic Arms Reduction Treaty (The New START)*.

The New START adalah salah satu perjanjian pelucutan senjata strategis yang menggunakan berhulu ledak nuklir. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang terbaru antara Amerika Serikat dan Rusia yang memiliki nama resmi *Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms*. Kata kunci dari penamaan tersebut terletak pada kata *Strategic Offensive Arms* yang terdiri dari dua kata yaitu *Strategic arms* yang berarti segala senjata yang memiliki jangkauan antar benua (*Intercontinental Coverage*) dan *Offensive* yang

⁵ *Deployed ICBMs (Intercontinental Ballistic Missile)* adalah Misil balistik dengan status terpasang dan siap dikerahkan dengan jarak tempuh antar benua yang siap diluncurkan dan berada di dalam peluncur (*Launcher*). Department of Defense Joint Doctrine Division. 2007. *Dictionary of Military and Associated Terms*. [http://www.military-dictionary.org/International-Relations-and.../Deployed ICBMs \[1](http://www.military-dictionary.org/International-Relations-and.../Deployed ICBMs [1) Agustus 2016].

⁶ *Deployed SLBMS (Submarine Launched Ballistic Missile)* adalah Misil balistik dengan status terpasang dan siap dikerahkan yang mampu diluncurkan dari kapal selam dalam kondisi siap diluncurkan. Department of Defense Joint Doctrine Division. 2007. *Dictionary of Military and Associated Terms*. [http://www.military-dictionary.org/International-Relations-and.../Deployed SLBMs \[1](http://www.military-dictionary.org/International-Relations-and.../Deployed SLBMs [1) Agustus 2016].

⁷ *Deployed heavy bomber* adalah jenis pesawat pembom dengan status siap dikerahkan yang memiliki jarak tempuh sejauh 8000 kilometer dan dipersenjatai dengan *ALCM (Air Launched Cruise Missil)* dengan hulu ledak nuklir. Department of Defense Joint Doctrine Division. 2007. *Dictionary of Military and Associated Terms*. [http://www.military-dictionary.org/International-Relations-and.../Deployed heavy bomber \[1](http://www.military-dictionary.org/International-Relations-and.../Deployed heavy bomber [1) Agustus 2016].

⁸ *Launchers* adalah suatu alat atau mesin yang memiliki mekanisme peluncuran yang meluncurkan persenjataan baik peluru, bom, roket, misil dan lain-lain guna mencapai sasaran. Department of Defense Joint Doctrine Division. 2007. *Dictionary of Military and Associated Terms*. [http://www.military-dictionary.org/International-Relations-and.../launcher \[1](http://www.military-dictionary.org/International-Relations-and.../launcher [1) Agustus 2016].

berarti digunakan untuk menyerang. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 8 April 2010 di Praha dan setelah diratifikasi perjanjian ini mulai diterapkan sejak tanggal 5 Februari 2011⁹ dan akan berlaku sampai 5 Februari 2021. Poin - poin perjanjian *START I* hanya mengatur pembatasan maksimal 6000 *warheads* pada *deployed ICBMs*, *deployed SLBMs*, dan *deployed heavy bomber* serta membatasi 1600 *launchers* sedangkan perjanjian *SORT* menambah pengurangan batas kepemilikan menjadi hanya 1700-2200 *warheads* namun tidak mengatur jumlah kepemilikan *launcher*.

Secara garis besar kewajiban perjanjian *The New START* menjelaskan bahwa batas agregat kepemilikan senjata strategis sebagai berikut¹⁰:

1. Membatasi jumlah kepemilikan maksimal sebanyak 700 *deployed Intercontinental Ballistic Misil (ICBM)*, *deployed Submarine Launched Ballistic Misil (SLBM)*, dan *deployed Heavy bomber*
2. Membatasi jumlah kepemilikan maksimal hulu ledak (*Warhead*) sebanyak 1550 pada *deployed ICBMs*, *deployed SLBMs*, dan *deployed heavy bombers* yang dipersenjatai dengan nuklear. Setiap *Heavy bomber* yang dipersenjatai dengan nuklir akan terhitung sebagai satu hulu ledak atau *Warheads* dan terikat dalam batasan perjanjian ini
3. Membatasi jumlah kepemilikan sebanyak 800 *deployed* dan *Undeployed ICBM launchers*, *deployed* dan *undeployed SLBM launchers* dan *deployed* dan *undeployed heavy bombers*

Dalam perjanjian *New START* terdapat konsep *deployed* dan *undeployed*. Semua item perjanjian yang berstatus *deployed* adalah item yang telah terpasang dan siap untuk dikerahkan, sedangkan *undeployed* atau *non deployed* adalah status yang diberikan pada item perjanjian yang belum terpasang atau belum siap

⁹ U.S. Department of State. 2010. *New START*. <http://www.state.gov/t/avc/newstart/index.htm> [24 Juli 2016]

dikerahkan. Item-item perjanjian yang dimaksud adalah *ICBMs*, *SLBMs*, *warheads* atau hulu ledak dan *heavy bomber*.

ICBMs dan *SLBMs* adalah misil balistik antar benua yang mampu membawa lebih dari satu *warheads*, maka dari itu jika satu misil membawa 10 *warheads* maka akan tetap terhitung 10. Sama halnya dengan *heavy bomber* yang dipersenjatai nuklir juga akan termasuk dan dihitung satuan. Kemudian batas 1550 *warheads* yang dimaksudkan meliputi keseluruhan *warheads* baik yang mengandung nuklir atau pun tidak. Walaupun begitu masing-masing negara memiliki fleksibilitas dalam menentukan struktur kekuatan strategis. Perjanjian ini juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Rusia wajib melakukan pengurangan yang diperlukan dalam kurun waktu tidak boleh lebih dari tujuh tahun setelah perjanjian ini berlaku.

Perjanjian ini akan meneruskan nilai-nilai perjanjian *START I* dan menggantikan perjanjian *SORT* (*Strategic Offensive Reduction Treaty*) atau disebut juga *Moscow Treaty*. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling baru yang diharapkan mampu menjadi successor dalam meneruskan nilai-nilai rezim perjanjian sebelumnya sehingga menarik untuk diteliti terkait keefektifan perjanjian ini dalam memantau dan mengurangi jumlah kepemilikan senjata strategis. Untuk selanjutnya karya ilmiah ini berjudul **PERJANJIAN THE NEW START ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN RUSIA**

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan ruang lingkup dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena batasan batasan tersebut akan menjadi titik fokus dalam membuat suatu karya ilmiah. Tujuan lain dari pembatasan ruang lingkup ini agar pembahasan sesuai dengan fokus utama pembahasan dan teori yang akan digunakan. Selain itu ruang lingkup pembahasan ini juga berguna untuk membingkai pembahasan agar tidak keluar dari topik utama yang akan dibahas. Terdapat dua bagian batasan yang digunakan yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1. Batasan Materi

Batasan materi adalah batasan yang diberikan agar karya ilmiah lebih terarah dan fokus pada inti dari bahasan yang ditulis. Dalam penulisan karya ilmiah ini akan dibatasi pada efektivitas perjanjian *The New START* dalam membatasi jumlah kepemilikan senjata strategis yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia.

1.2.2. Batasan Waktu

Sama halnya dengan batasan materi, batasan waktu juga merupakan hal yang sangat penting. Batasan waktu berperan sebagai pembingkai dan mempertegas rentang waktu data yang akan digunakan dalam karya ilmiah. Dalam karya ilmiah ini batasan waktu yang akan digunakan adalah tahun 2009 hingga tahun 2016. Pengambilan batasan waktu dimulai pada tahun 2009 karena pada tahun 2009 merupakan tahun dimulainya rancangan perjanjian *The New START* yang mana terdapat banyak pertemuan-pertemuan Amerika Serikat dan Rusia guna membicarakan rancangan perjanjian. Tahun 2016 menjadi batasan waktu terakhir dalam mengamati perkembangan perjanjian tersebut karena tahun 2016 merupakan penghujung tahun yang memungkinkan dalam menggali data penelitian terbaru. Batasan waktu tersebut merupakan batas waktu untuk fokus utama penelitian namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk mengambil data di luar rentang waktu yang telah penulis cantumkan selama data tersebut penting dan berkaitan dengan fokus utama karya ilmiah ini.

1.3. Rumusan Masalah.

Bagaimanakah efektivitas rezim perjanjian *The New START* dalam membatasi senjata strategis yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia ?

1.4. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :
Mengetahui efektivitas rezim perjanjian *The New START* dalam mengurangi dan memantau persenjataan strategis yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia

1.5. Landasan Teori.

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam penelitian adalah teori. Suatu landasan teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Menurut Neumen pengertian teori itu sendiri adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena¹¹. Berkaitan dengan menjawab rumusan masalah, teori yang akan dipakai adalah **Teori efektifitas rezim internasional**

Dalam mengkaji efektifitas rezim *the New START* ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Tahapan ini meliputi tiga pertanyaan yang perlu di jawab, yaitu :

1. Apa itu rezim internasional ?
2. Apa makna secara umum dari efektifitas ?
3. Bagaimanakah efektifitas rezim perjanjian *The New START* dalam membatasi senjata strategis yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia ?

Rezim internasional menurut Stephen D. Krasner adalah “*as sets of implicit or explicit principles, norm, rules, and decision making procedures around which actors expectations converge in a given issue-area.*”¹²

Menurut Krasner rezim internasional merupakan prinsip implisit maupun eksplisit baik berupa norma, aturan, maupun prosedur pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beberapa aktor tertentu yang merupakan bagian dari hubungan internasional untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan bersama dalam isu tertentu .

Dalam praktiknya, suatu rezim internasional biasanya diorganisasikan dengan perjanjian antar negara yang terlibat, sehingga rezim tersebut dapat

¹¹ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta. Hal 28

¹² Stephen D. Krasner. 1982. “*Internasional Regime*”. New York, Cornell University Press, Hal 185

menjadi sumber utama hukum internasional yang sah. Namun, tidak menutup kemungkinan rezim internasional itu ada walaupun tidak berbentuk suatu institusi atau organisasi tertentu, yang terpenting adalah adanya *convergen expectation* atau harapan yang diharapkan bersama oleh para aktor yang terlibat sehingga tercipta suatu peraturan (*rule*) yang mengikat diantara mereka. Karena itu rezim dikatakan berhasil dan berjalan baik apabila rezim memiliki fungsi yang dapat mempengaruhi tindakan atau pemikiran setiap aktor yang berada dalam keanggotaannya.

Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins mengatakan bahwa salah satu fungsi utama rezim internasional adalah mengatur, membatasi bahkan memaksa para anggotanya untuk berperilaku sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka capai, memilih isu-isu yang layak diperhatikan dan aktivitas apa saja yang terlegitimasi dan yang tidak terlegitimasi, serta bagaimana dan kapan suatu konflik diselesaikan. Karena itu menurut Puchala and Hopkins, rezim internasional sejatinya merupakan salah satu bentuk wadah penyaluran ide, impian dan aksi yang mempengaruhi dunia perpolitikan dalam sistem internasional¹³.

Sesuai dengan penjelasan di atas perjanjian *New START* merupakan suatu wadah yang legal bagi Amerika Serikat dan Rusia yang berperan sebagai aktor untuk menyalurkan ide, impian, dan aksi yang diharapkan akan mampu mempengaruhi masing-masing pihak untuk mewujudkan tujuan utama yang telah ditentukan pada awal terbentuknya perjanjian *New START*. *New START* menjadi alat bagi Amerika Serikat dan Rusia untuk secara legal saling mengawasi, saling menyeimbangkan kekuatan (*Balancing of Power*), dan saling menekan untuk sama-sama mengurangi kepemilikan senjata strategis. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa *New START* akan menjadi alat bagi Amerika Serikat dan Rusia untuk mempengaruhi dunia internasional terkait *disarmament* dan *transparansi*. Hal tersebut kemudian menjadi fungsi dari rezim perjanjian *New START*.

¹³ Puchalla, Donald J. dan Hopkins, Raymon F. Spring, 1982. *International Organization*. Internasional Regimes, vol 36. London : The MIT press

Ketika suatu rezim telah memiliki fungsi maka tidak akan lepas dari pertanyaan sejauh mana fungsi tersebut berjalan? Apakah fungsi dari rezim *New START* telah berjalan baik atau sebaliknya? Dari pertanyaan ini kemudian timbul konsep sejauh mana efektifitas dari rezim itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya pengukuran dari efektifitas rezim perjanjian *New START*.

Mengukur efektifitas suatu rezim internasional bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Maka dari itu sebelum memahami lebih dalam tentang efektivitas rezim internasional perlu dipahami makna dari efektifitas itu sendiri. Menurut Hidayat definisi efektifitas secara umum adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, semakin besar persentase target yang dicapai semakin tinggi efektifitasnya¹⁴.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas secara umum adalah suatu keadaan atau ukuran yang menunjukkan sejauh mana sasaran yang telah ditentukan di awal tercapai. Semakin banyak sasaran yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan awal yang disepakati .

Dalam kasus ini untuk melihat efektifitas dari perjanjian *The New START* maka akan digunakan teori efektifitas rezim internasional dari Arild Underdal, menurut Arild Underdal “...*regime can be considered effective to the extent that it successfully performs a certain (set of) function(s) or solves the problem(s) that motivated its establishment...*”¹⁵. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu rezim internasional berjalan efektif jika mampu menjalankan fungsi atau memecahkan masalah yang menjadi latar belakang terbentuknya rezim. Semakin kuat rezim menjalankan fungsinya atau semakin kuat rezim mampu memecahkan masalah maka semakin efektif pula rezim tersebut.

¹⁴ S. P. Siagian. 1991, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta:Gunung Agung,. Hlm 45

¹⁵ Arild Underdal. 2002. “One Question, Two Answer”. Dalam buku *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. London: the MIT press Cambridge,. Hlm 4

Berdasarkan hal ini, untuk mengukur efektifitas suatu rezim, Arild Underdal menentukan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari tipe permasalahan yang ada dalam suatu rezim dan juga kemampuan dari rezim untuk menguraikan dan menyelesaikan masalah tersebut. Variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen yang merupakan variabel yang digunakan untuk menganalisis efektivitas dari rezim.

Variabel Independen

Jika hubungan yang terdapat antar aktor dalam hal ini negara cenderung baik (*benign*), maka rezim yang ada akan mudah dalam mendapatkan kesepakatan bersama dan cenderung efektif. Sedangkan sebaliknya, jika hubungan yang terjalin antar aktor negara lebih bersifat buruk (*malign*), maka akan sangat sulit untuk mencapai kesepakatan bersama dan cenderung tidak efektif. Semakin harmonis dan erat hubungan antar aktor negara yang ada dalam sebuah rezim internasional, maka permasalahan yang ada biasanya lebih cenderung bersifat *benign*. Begitupun sebaliknya, semakin tidak harmonis aktor yang terlibat di dalamnya, maka sebuah masalah yang ada dalam sebuah rezim akan bersifat *malign*. Dengan menggunakan Variabel ini kita akan mampu melihat sejauh mana permasalahan yang ada dapat diorganisir oleh rezim ini. Adapun Variabel independen adalah *problem malignancy* dan *problem solving*¹⁶.

Underdal berargumen bahwa suatu rezim cenderung menjadi tidak efektif apabila memiliki hubungan yang *malign* disertai dengan adanya *Problem malignancy* yang didefinisikan sebagai masalah yang rumit dan sulit untuk diselesaikan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam rezim sehingga sulit untuk melakukan kerjasama. *Problem malignancy* ditandai dengan adanya ketidaksepahaman terkait pentingnya suatu isu untuk dibahas (*incongruity*), hal ini mengakibatkan aktor-aktor dalam rezim tidak bisa mencapai kesepakatan dan kesepakatan yang kemudian mengakibatkan masalah tersebut tidak terpecahkan. Dua indikator dalam *incongruity* adalah *asymmetry* dan *cumulative cleavages*. *Asymmetry* adalah perbedaan kepentingan nasional antar aktor yang terlibat dalam sebuah rezim,

¹⁶ Ibid, hlm 15

sedangkan *cumulative cleavages* merupakan akumulasi dari perbedaan-perbedaan aktor yang terlibat dalam rezim yang pada akhirnya mengakibatkan perpecahan dalam rezim itu sendiri.¹⁷

Problem Malignancy

Problem malignancy merupakan masalah-masalah yang bersifat buruk dan sulit untuk diselesaikan oleh aktor – aktor dalam suatu rezim sehingga membuat mereka tidak mau bekerjasama baik secara politis dan sulit untuk mencapai kesepakatan. Underdal berargumen bahwa suatu rezim cenderung menjadi tidak efektif apabila memiliki hubungan yang *malign* dan disertai dengan adanya *Problem malignancy* dalam rezim sehingga sulit untuk melakukan kerjasama. Jika suatu rezim memiliki hubungan yang *malign* namun tidak memiliki *problem malignancy* maka masih berpotensi berjalan efektif tergantung sejauh mana mekanisme *problem solving* mampu menyelesaikan masalah. *Problem malignancy* ditandai dengan adanya ketidaksepahaman terkait pentingnya suatu isu untuk dibahas (*incongruity*), hal ini mengakibatkan aktor-aktor dalam rezim tidak bisa mencapai kesepakatan dan kesepakatan yang kemudian mengakibatkan masalah tersebut tidak terpecahkan. *Problem Malignancy* ditandai dengan adanya *Incongruity* atau suatu kondisi dimana terdapat ketidaksepahaman akan pentingnya suatu isu untuk dibahas dan diselesaikan bersama. *Incongruity* memiliki dua indikator yaitu *asymmetry* dan *cumulative cleavage*.

Asymmetry adalah kondisi dimana terdapat kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dan tujuan dibentuknya rezim sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan rezim. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan nasional yang berbeda – beda antara negara anggota yang terdapat dalam sebuah rezim.

Cumulative cleavages adalah kondisi dimana perbedaan-perbedaan yang ada sudah dalam tahap yang terakumulasi sehingga dapat menimbulkan perpecahan antar negara anggota.

¹⁷ Arild Underdal. 2002. "One Question, Two Answer". Dalam buku *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. London: the MIT press Cambridge, hlm 15

Problem Solving Capacity

Underdal berargumen bahwa permasalahan yang terdapat dalam sebuah rezim dapat diatasi secara efektif apabila masalah tersebut ditangani oleh lembaga atau sistem yang memiliki power yang kuat yang didukung dengan adanya ketrampilan atau *skill* serta energi yang memadai dari lembaga tersebut. Apabila satu solusi dihasilkan melalui keputusan kolektif, maka *problem solving capacity* bisa dipahami sebagai fungsi saling terkait yang terdiri dari tiga unsur, yaitu *institutional setting the rules of the game*, *distribution of power*, dan *skill and energy*.¹⁸

Institutional setting (the rules of the game) menurut Underdal adalah “*The Institutional Setting refers to constellations of rights and rules that define social practices, assign roles to participants in those activities, and guide interactions among those who occupy those roles.*”¹⁹ Jadi *Institutional setting (the rules of the game)* merupakan suatu tatanan hak dan peraturan yang menggambarkan praktek sosial, memberikan peran terhadap aktor dalam suatu kegiatan, dan membimbing interaksi antar aktor yang terikat dalam peraturan tersebut. Jadi sederhananya *Institutional setting (the rules of the game)* merupakan suatu tatanan institusi atau kumpulan hukum yang menjadi aturan main dalam suatu rezim.

Distribution of power merupakan pembagian kekuasaan diantara aktor-aktor yang terlibat dalam masalah sehingga terdapat pembagian kekuasaan yang adil. Semisal terdapat pihak dominan yang dapat bertindak sebagai leader namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan, dan juga ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan.

Skill (keahlian) dan *energy* (kekuatan) merupakan sumber kekuatan rezim itu sendiri untuk mengontrol dan mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan. *Skill* dan *energy* dibutuhkan dalam memecahkan masalah karena dalam suatu rezim yang beranggotakan negara, sangat tidak mudah memecahkan

¹⁸ Ibid, hlm 21

¹⁹ Ibid, hlm 24

masalah tanpa adanya unsur *skill* dan *energy* yang mampu mengontrol atau setidaknya menjadi bahan pertimbangan negara anggota.

Variabel Dependen

Untuk membedakan dan mengukur efektivitas rezim, Underdal berpendapat bahwa :

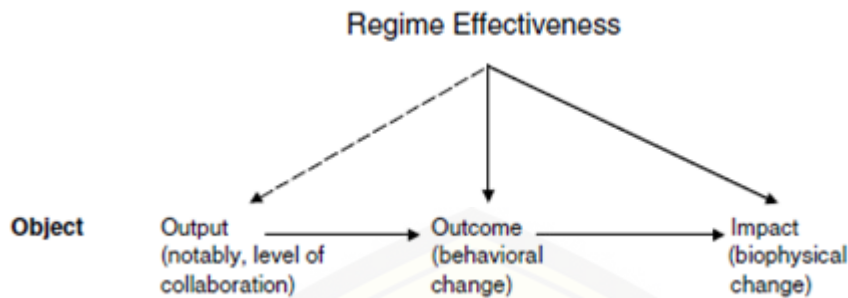
“...a distinction should be made between the formal output of a decision-making or regime-formation process (that is, the norms, principles, and rules constituting the regime itself) and the set one question, two answers of consequences flowing from the implementation of and adaptation to that regime. In the context of environmental policy, the latter may be further specified by drawing a distinction between consequences in the form of changes in human behavior (here referred to as outcome) and consequences that materialize as changes in the state of the biophysical environment itself (impact)”²⁰.

Berdasarkan pendapatnya tersebut untuk menganalisis efektivitas rezim dibutuhkan 3 komponen yang kemudian menjadi variabel dependen dalam mengukur efektivitas rezim. Variabel tersebut terdiri dari *output*, *outcome*, dan *impact* yang mana ketiga komponen tersebut terdapat dalam sebuah rezim internasional.

Output, *outcome*, dan *impact* kemudian di analisis dengan formula $Er = f(Sr.Cr) + Br$, dimana Er adalah efektivitas suatu rezim, Sr adalah *Stringency* (kekuatan aturan/*output*), Cr adalah *Compliance* (ketaatan anggota rezim terhadap aturan/*outcome*) dan Br berarti efek/dampak yang dihasilkan rezim (*impact*). Menurut formula tersebut Efektivitas rezim dapat ditentukan dengan melihat fungsi dari *output*, *outcome*, dan *impact*. Artinya, harus diperiksa terlebih dahulu *output*, *outcome* dan *impact* dari perjanjian *New START* untuk menentukan efektivitas rezim tersebut²¹.

²⁰ Ibid, hlm 6

²¹ Ibid, hlm 7



Gambar 1.1. Efektivitas Rezim²²

Menurut gambar 1 di atas, efektivitas rezim dapat dilihat dari *Output*, *Outcome*, dan *Impact*. *Output* akan menjadi landasan resmi diakuinya atau sahnya suatu rezim yang kemudian akan menghasilkan perubahan perubahan perilaku atau *Outcome*, kemudian perubahan perilaku ini akan memicu terciptanya dampak tertentu atau *Impact*.

Output

Output merupakan bentuk disepakatinya suatu rezim biasanya terdiri dari pengorganisasian, program, dan aturan yang ditetapkan oleh anggota yang terdapat dalam sebuah rezim untuk mengoperasionalkan ketentuan yang terdapat dalam rezim tersebut. Pada akhirnya hal-hal yang pada awalnya hanya berupa kesepakatan dapat diwujudkan dalam sebuah proses pembentukan yang dapat berwujud secara tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Arild Underdal *output* memiliki dua tingkatan yaitu level satu dan level dua. Suatu rezim mencapai *output* level satu apabila nilai dan tujuan rezim terwujud menjadi perjanjian tertulis yang secara resmi di tanda tangani oleh pihak yang terlibat. Sedangkan, *output* level dua dicapai apabila terdapat langkah – langkah domestik yang dilakukan negara terkait rezim seperti terciptanya atau dirubahnya suatu kebijakan dan peraturan dalam negeri mengikuti nilai-nilai dan tujuan rezim. Semakin tinggi output level atau semakin banyak perangkat aturan yang terbentuk maka *output* akan berpengaruh positif terhadap efektivitas.²³

²² Ibid, hlm 6

²³ Ibid, hlm 6

Outcome

Outcome merupakan sebuah perubahan perilaku pada suatu obyek yang terkena imbas dari ketentuan yang berlaku dalam sebuah rezim. Baik berupa penghentian tindakan yang dilakukan sebelum rezim berdiri maupun tindakan yang tidak dilakukan sebelum rezim berdiri. Jika selama rezim berlaku terdapat perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan terbentuknya rezim maka *outcome* akan bernilai positif namun jika setelah rezim berlaku namun tidak ada perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan terbentuknya rezim maka *outcome* akan bernilai negatif.

Impact

Impact merupakan dampak yang terjadi berkaitan dengan tingkat keberhasilan dari efektivitas rezim tersebut dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar dari pemikiran dalam pembentukan rezim. Pada masa ini, dapat dilihat apakah obyek atau anggota rezim mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan yang di atur. *Impact* akan bernilai positif jika terdapat dampak yang menunjukkan keberhasilan suatu rezim mengatasi masalah atau tercapainya tujuan yang menjadi dasar pemikiran terbentuknya rezim. Sebaliknya, *impact* bernilai negatif jika tidak ada dampak signifikan yang terjadi terkait tujuan utama terbentuknya rezim. Walaupun ada perubahan perilaku yang terjadi namun belum tentu menyebabkan tercapainya tujuan utama terbentuknya rezim.

Jika *output*, *outcome*, dan *impact* bernilai positif dalam artian sesuai dengan tujuan utama terbentuknya rezim maka rezim perjanjian *New START* akan bernilai efektif, Namun Jika *output*, *outcome*, dan *impact* ternyata bernilai negatif atau tidak sesuai dengan tujuan utama terbentuknya rezim maka rezim perjanjian *New START* bernilai tidak efektif.

1.6. Argumen Utama

Argumen utama atau biasa disebut juga dengan hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap suatu pertanyaan, karena jawaban tersebut belum di uji secara kualitatif. Argumen utama dalam penelitian ini adalah : **Rezim perjanjian *New START* berjalan efektif karena kedua negara memiliki**

tujuan yang sama dalam perumusan perjanjian. Kedua negara juga berusaha untuk me-reset hubungan mereka, dan aturan-aturan dalam perjanjian *New START* merupakan penyempurnaan dari kedua perjanjian sebelumnya. Selain itu rezim perjanjian *New START* berhasil menjadi aturan dan hukum resmi yang disepakati bersama (*output*), berhasil mengurangi jumlah kepemilikan senjata strategis nyaris mendekati target yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2016 dan memiliki potensi untuk mencapai target hingga batas terakhir yaitu 5 februari 2018 (*outcome*), serta memiliki dampak terhadap pengurangan dan transparansi terkait jumlah kepemilikan senjata strategis dunia (*impact*).

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu syarat untuk melakukan penelitian metode penelitian mempunyai peranan yang sangat vital dalam suatu penelitian. Penggunaan metode dalam suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan kerangka berfikir dan data data yang dibutuhkan, dengan tujuan agar penelitian menjadi ilmiah, sistematis, dan kronologis. Metode penelitian yang dilakukan penulis mencakup pengumpulan data dan analisis data sebagai hasil akhirnya.

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam karya ilmiah ini penelitian akan dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang berarti data-data pengamatan terhadap obyek yang diteliti tidak di peroleh secara langsung, tetapi di dapatkan dari jurnal-jurnal, buku-buku terbitan, artikel atau pemberitaan dimedia massa, karya ilmiah yang dianggap relevan serta informasi yang didapat di internet.

Dengan demikian metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah metode penelitian kepustakaan atau *literatur research*. Tempat-tempat yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Perpustakaan Jember
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Jember

- c. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Sumber literatur :

- a. Majalah , surat kabar dan media cetak lainnya
- b. Media internet
- c. Koleksi pribadi

1.7.2. Teknik analisis data

Untuk menghasilkan penelitian yang logis dan obyektif maka diperlukan metode analisis berdasarkan fakta-fakta yang aktual, kongkrit dan obyektif serta di dukung oleh konsep ilmiah sebelum menentukan argument utama. Oleh karena itu, teknik analisis data harus sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian deskriptif maka penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu menganalisis data atas pandangan pendapat dan pemikiran analisa data. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti di sarankan oleh data.

1.8. Sistematika penulisan

Sebagai upaya mempermudah penulisan serta mensistematiskan penulisan karya ilmiah ini, skripsi ini akan disusun menjadi lima bab. Bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi isi perjanjian *The New START*, bab 3 berisi implementasi perjanjian *The New START*, bab 4 berisi efektivitas rezim perjanjian *The New START*, dan bab 5 berisi kesimpulan.

Bab 1 Pendahuluan menyajikan poin-poin penting yang kemudian menjadi alasan dasar perjanjian *The New START* menarik untuk di teliti. Poin-poin tersebut meliputi latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab 2 Isi Perjanjian *The New START* membahas isi perjanjian yang menjadi aturan main dan dasar hukum bagi Amerika Serikat dan Rusia. Bab ini akan menjelaskan apa itu perjanjian *The New START* dan menjelaskan secara rinci tentang isi perjanjian yang ada didalamnya.

Bab 3 Implementasi Perjanjian *The New START* mendeskripsikan tentang implementasi *The New START* sejak tahun 2009 hingga tahun 2016 sesuai dengan batasan waktu karya ilmiah ini. Bab ini akan memaparkan tindakan apa saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Rusia untuk menaati dan mematuhi aturan-aturan dalam perjanjian *The New START*.

Bab 4 Efektivitas Rezim Perjanjian *The New START* berisi pemaparan teori guna menjawab rumusan masalah. Bab ini akan menganalisa efektivitas dari perjanjian *The New START* sesuai dengan teori efektifitas rezim internasional. Efektivitas akan diukur melalui variabel dependen dan independen.

Bab 5 Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah dan hasil akhir penelitian. Bab ini menjawab efektivitas dari perjanjian *The New START*.

BAB 2. ISI PERJANJIAN THE NEW START

Sejak era perang dingin pada tahun 1960 hingga sekarang telah tercapai banyak perjanjian pengurangan dan pembatasan kemampuan serangan nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Rusia. Hal ini bisa tercapai karena adanya kesadaran kedua negara bahwa senjata-senjata nuklir yang di produksi selama perang dingin tidak pernah digunakan sama sekali.²⁴ Tidak di gunakannya senjata nuklir tersebut merupakan akibat dari adanya efek *deterrence*, yaitu Amerika Serikat atau Uni Soviet tidak akan melakukan serangan karena khawatir negaranya akan balik diserang. Jika tetap melakukan serangan maka yang akan terjadi adalah efek saling menghancurkan satu sama lain.²⁵ Efek *Deterrence* ini menciptakan kondisi kedua negara tidak pernah menggunakan senjata nuklir dan hanya menjadikan senjata nuklir sebagai alat politik dalam bidang keamanan.

Selain karena alasan efek *deterrence*, bagi Amerika Serikat dan Rusia pengurangan senjata nuklir juga akan memberikan citra baik kepada dunia internasional. Perubahan strategi luar negeri Amerika Serikat dan Rusia adalah gambaran dari bagaimana kepentingan nasional kedua pihak telah mengalami perkembangan. Kepemilikan nuklir tidak lagi menjadi bagian dari strategi utama kedua pihak, yang diutamakan adalah perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia.²⁶

Melalui perbandingan kebijakan luar negeri kedua negara, ditemukan beberapa persamaan dalam penjabaran strategi luar negeri Amerika Serikat dan Rusia yaitu bagaimana peserta perjanjian merasa perlunya penguatan ekonomi, penanggulangan terorisme, dan strategi untuk kembali merebut perhatian, simpati,

²⁴ Jennifer A. Hurley. 1999. *Weapons Of Mass Destruction*. Michigan: Green Haven press. hal 58.

²⁵ Robert Jastrow. 1985. *How to Make Nuclear Weapon Obsolete*. Toronto: Little, Brown and Company. Hal 123

²⁶ The World Reporter. 2014. *Comparative Study of EU, US and Russian Security Strategies*. <http://www.theworldreporter.com/2014/06/comparative-study-eu-us-russian-security-strategies.html>

dan empati dunia internasional.²⁷ Oleh karena itu berbagai negosiasi dan pertemuan sering dilakukan guna mewujudkan hal tersebut. Dari seluruh pertemuan dan perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang kemudian kita kenal sebagai negara Rusia, *New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)* merupakan salah satu kesepakatan yang paling penting. Perjanjian *New START* adalah kelanjutan dari berbagai perjanjian nuklir sebelumnya yang kini menjadi perjanjian terbesar dalam pengurangan kepemilikan senjata nuklir secara massal. Perjanjian *New START* direncanakan akan mampu mengurangi jumlah kepemilikan senjata nuklir hingga 60%.²⁸

Menurut Hans M. Kristensen selaku direktur dari *Nuclear Information Project at the Federation of American Scientists* perjanjian *New START* merupakan suatu pencapaian yang penting dalam me-restart hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia. *New START* merupakan rezim transparansi dan *disarmament* yang memperbaharui dan memperpanjang rezim *START*. *New START* mengatur secara spesifik terkait pengurangan, pemantauan dan verifikasi kepemilikan senjata nuklir dibawah naungan rezim besar NPT “*Non Proliferation Treaty*”. Upaya pengurangan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia merupakan langkah bilateral yang telah ditempuh lebih dari 40 Tahun dan masih bertahan hingga saat ini *New START*.²⁹

Rezim perjanjian *New START* merupakan bentuk tanggapan atas tidak efektifnya rezim “*Non-Proliferation Treaty*” (NPT). Arief Darmawan dalam tesisnya yang berjudul Efektivitas Rezim NPT dalam menghadapi isu proliferasi senjata nuklir, menyatakan bahwa rezim NPT tidak efektif dalam menghentikan permasalahan proliferasi senjata pemusnah massal. Hal ini dikarenakan tingkat kolaborasi dalam rezim tersebut rendah. Adanya perbedaan kepentingan dan pandangan (*asymmetry*) diantara *Nuclear Weapon State* (NWS) dan *Non Nuclear Weapon State* (NNWS) mengenai proliferasi senjata pemusnah massal

²⁷ Loc.cit

²⁸ Arms Control Center. 2010. *Treaty Between The United States Of America And The Russian Federation On Measures For The Further Reduction And Limitation Of Strategic Offensive Arms*. http://amscontrolcenter.org/assets/pdfs/START_Briefing_Book_4-6-2010.pdf

²⁹ Federation of American Scientist. 2010. *New START has New Counting*. <https://fas.org/blogs/security/2010/03/newstart/> [20 february 2017]

menyebabkan kurang efektifnya kerjasama didalam rezim, dengan kata lain belum ada koordinasi yang terencana dan terintegrasi serta belum ada bentuk implementasi aturan yang efektif. Dalam tesis ini Arif Darmawan hanya menekankan ketidak efektifan rezim non proliferasi nuklir dari tingkat *malignancy* dikarenakan rezim ini banyak dikritik karena hanya berpihak pada NWS dan tidak adil terhadap NNWS.³⁰

Lemahnya rezim NPT menjadi salah satu latar belakang terbentuknya perjanjian *New START*. Amerika Serikat dan Russia yang merupakan negara NWS (*Nuclear Weapon State*) memutuskan untuk membuat aturan baru yang lebih spesifik dalam pengurangan senjata nuklir strategis, pemantauan, dan verifikasi yang kemudian dirumuskan dalam perjanjian *New START*.³¹

The New START adalah perjanjian pelucutan senjata strategis yang memiliki jarak tempuh sangat jauh. *The New START* terdiri dari tiga bagian yaitu teks perjanjian utama yang terdiri dari enam belas pasal, protokol yang terdiri dari sepuluh bagian, dan tiga lampiran.

Perjanjian *The New START* memiliki nama resmi *Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms*. Kata kunci dari penamaan tersebut terletak pada kata *Strategic Offensive Arms* yang terdiri dari dua kata yaitu *strategic arms* yang berarti segala senjata yang memiliki jangkauan antar benua (*intercontinental coverage*) dengan jarak lebih dari 5500 km³² dan *offensive* yang berarti digunakan untuk menyerang. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 8 April 2010 di Praha dan setelah diratifikasi perjanjian ini START diterapkan sejak tanggal 5 Februari 2011³³ dan berlaku sampai 5 Februari 2021.

Teks perjanjian utama diawali oleh *preamble* atau pembukaan yang berfungsi sebagai pengantar perjanjian dan menetapkan konteks umum dan tujuan

³⁰ Arif Darmawan. 2007. *Efektivitas Rezim Non-Proliferation Treaty (NPT) dalam menghadapi isu Proliferasi senjata nuklir*. Yogyakarta: Universitas Gajahmada

³¹ Sergey Oznobishchev. 2009. Prospects for U.S.-Russian Arms control and Disarmament: A Russian Perspective. *Strategic Insights*. Volume VIII, Issue 4. Lihat <https://www.hsdl.org/?view&did=791506>

³² Federation Of Americans Scientist. 1998. *Intercontinental weapons*. <https://fas.org/nuke/intro/missile/icbm.htm> [20 october 2016]

³³ U.S. Department of State.2010. *New START*. <http://www.state.gov/t/avc/newstart/index.htm> [24 Juli 2016]

dari traktat. Pembukaan menggambarkan tentang kesepahaman bersama antara Amerika Serikat dan Rusia. Peserta perjanjian menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan dan permasalahan global diperlukan pendekatan baru dalam interaksi hubungan antar negara peserta perjanjian. Oleh karena itu peserta perjanjian berusaha untuk menjalin hubungan strategis baru berdasarkan rasa saling percaya, keterbukaan, prediktabilitas, dan kerjasama. Atas dasar keinginan tersebut peserta perjanjian merasa perlu untuk mengurangi lebih lanjut peran dan pentingnya kepemilikan senjata nuklir.

Dalam paragraf ke lima dan ke enam pembukaan, peserta perjanjian menegaskan kembali komitmen peserta perjanjian untuk memenuhi kewajiban peserta perjanjian di bawah Pasal VI dari Perjanjian non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang menyatakan bahwa sebagai peserta perjanjian NPT peserta perjanjian berhak berusaha melanjutkan negosiasi dan menentukan langkah-langkah efektif yang berkaitan dengan penghentian perlombaan senjata nuklir, dan peserta perjanjian bersama-sama menyatakan dukungan yang kuat bagi upaya yang sedang berlangsung dalam NPT.

Selanjutnya Amerika Serikat dan Rusia menyatakan untuk melanjutkan upaya peserta perjanjian untuk mengurangi dan membatasi senjata nuklir dengan tetap menjaga keselamatan dan keamanan persenjataan nuklir peserta perjanjian, dengan tujuan untuk memperluas proses ini di masa depan, dan menyertakan pendekatan multilateral. Peserta perjanjian dalam negosiasinya juga mengikutsertakan persediaan senjata nuklir baik yang berstatus *Deployed* maupun *Undeployed*.

Lewat perjanjian ini, Amerika Serikat dan Rusia menginginkan adanya proses verifikasi dalam perjanjian. Proses pengurangan yang signifikan dan terverifikasi dalam persenjataan nuklir akan memiliki efek positif pada situasi dunia. Kedua peserta perjanjian akan menciptakan mekanisme verifikasi berdasarkan Perjanjian *START I* yang disesuaikan, disederhanakan, dan lebih sedikit biaya untuk diimplementasikan.

Dalam penutup pembukaan perjanjian *The New START*, Amerika Serikat dan Rusia mengungkapkan apresiasinya dalam pelaksanaan perjanjian *START I*

dan perjanjian *SORT* (*Strategic Offensive Reduction Treaty*) atau disebut juga *Moscow Treaty* yang mana pada saat perjanjian *START I* Rusia masih menjadi Uni Soviet yang kemudian terpecah pada Desember 1991. Peserta perjanjian mengakui peran Republik Belarus, Republik Kazakhstan, dan Ukraina, bersama dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam menegakkan aturan perjanjian *START I* dan perjanjian *SORT*. Peserta perjanjian lebih lanjut mengungkapkan apresiasi yang mendalam kepada Republik Belarus, Republik Kazakhstan, dan Ukraina atas kontribusi peserta perjanjian saat ini yang hanya berstatus sebagai *non-Nuclear Weapon States* yang memperkuat rezim NPT. Isi perjanjian *the New START* membahas tiga hal yaitu ketentuan pengurangan kepemilikan persenjataan, pemantauan dan verifikasi, dan komisi bilateral konsultatif (*BCC*).

2.1. Pengurangan Kepemilikan Persenjataan

Perjanjian *The New START* mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan pengurangan hingga memenuhi batas kepemilikan persenjataan yang telah ditetapkan dalam batas utama perjanjian. Dalam pasal II Ayat 1 perjanjian *New START* mengatur bahwa para peserta perjanjian wajib mengurangi dan membatasi rudal balistik antar benua (*ICBM*) dan peluncur *ICBM*, rudal balistik kapal selam (*SLBM*) dan peluncur *SLBM*, *heavy bomber* yang dilengkapi persenjataan nuklir, hulu ledak *ICBM*, dan hulu ledak *SLBM*. Jadi selama tujuh tahun perjanjian ini berlaku dan sampai perjanjian ini berakhir batas kepemilikan senjata strategis tidak boleh melebihi angka yang sudah ditentukan sebagai berikut³⁴:

1. Membatasi jumlah kepemilikan maksimal sebanyak 700 *deployed Intercontinental Ballistic Misil (ICBM)*, *deployed Submarine Launched Ballistic Misil (SLBM)*, dan *deployed Heavy bomber*.
2. Membatasi jumlah kepemilikan maksimal hulu ledak (*Warhead*) sebanyak 1550 pada *deployed ICBMs*, *deployed SLBMs*, dan *deployed heavy bombers* yang dipersenjantai dengan nuklir. Setiap *Heavy bomber*

³⁴ U.S. Departement of State. *Loc.cit*,

yang dipersenjatai dengan nuklir akan terhitung sebagai satu hulu ledak atau *Warheads* dan terikat dalam batasan perjanjian ini.

3. Membatasi jumlah kepemilikan sebanyak 800 *deployed* dan *undeployed ICBM launchers*, *deployed* dan *undeployed SLBM launchers* dan *deployed* dan *undeployed heavy bombers*.

Deployed dan *undeployed* adalah konsep kunci dalam perjanjian dan dijelaskan di bagian satu dari protokol perjanjian *New START*. Sebuah *ICBM* atau *SLBM* dikatakan *deployed* atau terpasang, apabila *ICBM* atau *SLBM* tersebut terkandung di dalam suatu peluncur yang siap dikerahkan. Begitu juga dengan *delivery vehicle/launcher* yang merupakan media penghantar atau peluncur persenjataan juga di atur oleh perjanjian ini. Tiga peluncur yang di atur adalah *deployed ICBM launcher*, *deployed SLBM launcher*, dan *heavy bomber*. *deployed ICBM launcher* atau peluncur yang siap dikerahkan adalah peluncur yang telah terpasang *ICBM* dan bukan merupakan peluncur *test ICBM*, atau peluncur *ICBM* yang terletak di ruang penelitian. *Deployed SLBM launcher* adalah peluncur *SLBM* yang diinstal pada sebuah kapal selam yang siap dikerahkan dan telah terpasang *SLBM* di dalamnya, dan tidak dimaksudkan untuk pengujian atau pelatihan. Jika digunakan hanya untuk pengujian dan pelatihan, maka tidak memenuhi definisi peluncur baik *deployed* atau *undeployed*. *Deployed heavy bomber* adalah setiap pesawat bomber yang dilengkapi dengan persenjataan nuklir, bila *heavy bomber* uji coba dan *heavy bomber* yang dilengkapi untuk persenjataan nuklir namun terletak di fasilitas perbaikan atau fasilitas produksi maka tidak akan memenuhi definisi *deployed heavy bomber*.

Pengurangan jumlah kepemilikan persenjataan dapat dilakukan dengan prosedur konversi (pengubahan) atau pun Eliminasi (peniadaan). Namun demikian, secara eksplisit perjanjian ini menyatakan bahwa setiap peserta perjanjian memiliki hak untuk menentukan komposisi dan struktur (misalnya, jumlah dan jenis) senjata offensif strategis dalam batas-batas yang ditentukan dalam perjanjian, sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam kesepakatan

bersama 6 Juli 2009. Hal ini berarti bahwa setiap peserta perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana akan memenuhi batas kepemilikan dari Perjanjian pada akhir periode pengurangan tujuh tahun.

Perjanjian *The New START* memberikan jangka waktu selama tujuh tahun bagi kedua negara untuk memenuhi batas kepemilikan senjata nuklir. Kedua negara diharuskan mencapai batas kepemilikan persenjataan hingga batas akhir tertanggal 5 Februari 2018 baik melalui tindakan konversi maupun eliminasi terhadap persenjataannya.

Berdasarkan perjanjian *New START*, *ICBM launcher*, *SLBM launcher*, dan *heavy bomber* yang dilengkapi dengan senjata nuklir harus terus terhitung di bawah batas perjanjian sampai item tersebut dirubah atau ditiadakan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam protokol bagian ke tiga perjanjian ini. Ketentuan ini lebih ringan dibanding perjanjian *START I* sehingga akan memberikan fleksibilitas terhadap Amerika Serikat dan Rusia dalam menentukan bagaimana mengurangi kekuatan persenjataan untuk memenuhi batas kepemilikan perjanjian. Aturan Konversi dan eliminasi akan berlaku pada peluncur *ICBM*, peluncur Mobile *ICBM*, peluncur *SLBM*, dan *heavy bomber* dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Peluncur *ICBM*

Berdasarkan aturan *START I*, peluncur *ICBM* dihancurkan dengan cara digali keluar dengan kedalaman tidak kurang dari delapan meter, atau dengan diledakan dengan kedalaman tidak kurang dari enam meter. Jika rudal telah dipindahkan dari *missile silo*³⁵, namun *missile silo* tidak dimusnahkan dalam prosesnya, maka *missile silo* masih terhitung dan dianggap memiliki rudal terpasang dan rudal terpasang dianggap pula dipersenjataai dengan hulu ledak.

³⁵ *missile silo* adalah sebuah fasilitas peluncuran rudal yang terdapat di bawah tanah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan rudal balistik sekaligus tempat peluncuran rudal balistik. Protocol The New START. 2010. Part One: Terms and Definitions. <https://www.state.gov/documents/organization/140047.pdf> [16 Juli 2016]

Aturan *START I* terkesan lebih kaku dibandingkan *New START*. Dalam *New START* secara tertulis sesuai dengan protocol *New START* bagian ketiga sub bagian III mencantumkan tiga cara dalam memusnahkan peluncur *missile silo*. Cara pertama bahwa peluncur *missile silo* harus di gali keluar sampai dengan kedalaman tidak kurang dari delapan meter atau dengan di ledakan dengan kedalaman tidak kurang dari enam meter, cara yang kedua katup *missile silo* harus di bongkar dan tidak boleh terpasang lagi, kemudian *missile silo* harus diisi sepenuhnya dengan puing-puing yang dihasilkan dari pembongkaran bangunan atau infrastruktur, bisa juga dengan tanah atau kerikil, dan cara ketiga dengan prosedur alternatif lain yang mungkin dikembangkan oleh salah satu peserta perjanjian untuk menghilangkan *missile silo* nya. Cara ketiga ini harus didiskusikan dalam forum komisi permusyawaratan bilateral atau *Bilateral Consultative Commission (BCC)* dan disertai demonstrasi nyata ke peserta perjanjian lain. Jika demonstrasi telah dilakukan peserta perjanjian lain tidak bisa membantah atau menolak penggunaan metode tersebut. Oleh karena itu, bukannya meledakkan *missile silo* atau menggalnya keluar dari tanah, peserta perjanjian lebih memilih untuk menonaktifkan *missile silo* menggunakan langkah ketiga, asalkan memenuhi kriteria *missile silo* tidak akan bisa meluncurkan rudal lagi. Ini bisa menjadi jauh lebih murah dan efektif dalam mengkonversi *missile silo* daripada prosedur yang diatur oleh *START I*, serta akan membantu kedua negara menghilangkan beberapa *missile silo* yang telah kosong selama bertahun-tahun tetapi masih terus terhitung di dalam database *START I*. *Missile silo-missile silo* tersebut mencakup 50 *missile silo* yang menampung rudal *Peacekeeper* sampai tahun 2005 dan 50 *missile silo* yang menampung rudal *Minuteman III* sampai 2008. Amerika Serikat tidak pernah menghancurkan *missile silo* tersebut, sehingga *missile silo* tersebut terus terhitung di dalam database *START I*.

Berkat cara-cara baru dalam prosedur konversi dan eliminasi *the New START*. Amerika Serikat sekarang dapat menonaktifkan *missile silo* sehingga tidak lagi terdaftar dalam penghitungan *launcher* dalam *New START*. Menurut laporan terbaru, *Air Force Global Strike Command* telah melakukan persiapan untuk menghilangkan *missile silo* ini sejak bulan Maret 2011, dan berencana

untuk mengisinya dengan kerikil serta berharap menyelesaikan proses ini pada 2017.³⁶

b. Peluncur *ICBM mobile*

Berdasarkan aturan *START I*, proses eliminasi untuk peluncur mobile *ICBM* mengharuskan mekanisme penegak rudal dihilangkan dari badan utama peluncur sehingga kerangka penegak rudal tempat *ICBM* terpasang harus dipotong dan dipisahkan dari kerangka truk/kendaraan. *START I* juga mengharuskan 0,78 meter dari badan truk/kendaraan dipotong sehingga badan truk/kendaraan akan terlalu pendek untuk mengangkut *ICBM mobile*.

Berdasarkan aturan *New START*, proses eliminasi untuk peluncur Mobile *ICBM* jauh lebih sederhana. Sama halnya dengan *START I*, eliminasi harus dilakukan dengan menghilangkan mekanisme penegak rudal dan menghilangkan peralatan dukungan peluncuran rudal. Namun baik kerangka peluncur atau badan truk/kendaraan tidak harus dipotong. Jika badan truk/kendaraan tersebut hanya akan digunakan di fasilitas tertentu dengan tujuan tidak melanggar konsistensi perjanjian, permukaan kendaraan tersebut harus dicat dengan warna yang berbeda dari pola yang permukaan yang ada pada peluncur Mobile *ICBM* yang terpasang.

c. Peluncur *SLBM*

Berdasarkan *START I*, tabung peluncuran *SLBM* dapat dianggap tereliminasi ketika seluruh rudal di lucuti dari kapal selam atau seluruh komponen pendukung tabung peluncuran telah dihilangkan dari kapal selam. Tabung peluncuran rudal kemudian harus dipotong menjadi dua potong sama panjang. Di bawah *START I*, Amerika Serikat pada dasarnya harus menghancurkan seluruh kapal selam untuk sekedar menghapus tabung peluncur *SLBM* guna mencapai batas perjanjian.

Sedangkan di bawah *New START*, tabung peluncuran *SLBM* dapat dihilangkan dengan cara menghapus sebagian komponen tabung peluncuran rudal yang mendukung *SLBM* saja. Namun bagian rudal dari kapal selam dan tabung

³⁶ Defense Innovation Marketplace. 2014. *AIR FORCE GLOBAL STRIKE COMMAND 2014 STRATEGIC MASTER PLAN*. <http://www.defenseinnovationmarketplace.mil/resources/AFGS-2014StrategicPlan.pdf> [12 Oktober 2016]

peluncuran individu dapat tetap di tempat di kapal selam, jika komponen peluncuran telah diubah sehingga tak dapat lagi meluncurkan rudal balistik *SLBM* maka kapal selam tidak akan lagi masuk hitungan dalam perjanjian. Selain itu, tabung peluncuran *SLBM* yang telah dikonversi sesuai dengan prosedur ini dan tidak mampu lagi meluncurkan *SLBM* dapat ditempatkan bersama dengan tabung peluncuran yang masih mampu meluncurkan *SLBM*.

Setelah peserta perjanjian melakukan konversi sesuai dengan prosedur ini, maka akan diadakan pameran satu kali guna mendemonstrasikan peluncur yang telah dikonversi dan peluncur *SLBM* yang belum dikonversi. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada peserta perjanjian lain terkait bentuk atau fitur yang membedakan dari sebuah peluncur yang sudah dikonversi dan peluncur *SLBM* yang belum dikonversi.

Amerika Serikat berencana untuk menggunakan prosedur ini untuk mengurangi jumlah tabung peluncuran pada setiap SSBN dari 24 ke 20. Menurut laporan terakhir, Amerika Serikat akan memulai proses ini pada tahun 2015, sehingga diperkirakan Amerika Serikat akan memiliki tidak lebih dari 240 peluncur operasional untuk *SLBM* oleh batas waktu perjanjian Februari 2018.

Dengan ketentuan di *New START*, Amerika Serikat tidak hanya dapat mengkonversi kapal selam rudal balistik untuk tujuan penggunaan lain tanpa menghancurkan tabung rudal dan kompartemen rudal, namun tetap dapat mengurangi jumlah akuntabel peluncur *SLBM* digunakan pada kapal selam rudal balistik yang terus membawa *SLBM* bersenjata nuklir.

Ketentuan ini akan memberikan Amerika Serikat banyak fleksibilitas ketika menentukan struktur kekuatan nuklirnya di bawah *New START*. Selama dekade terakhir, Amerika Serikat mengkonversi empat kapal selam Trident sehingga peserta perjanjian tidak lagi membawa rudal balistik namun sekarang membawa *Cruise Missile* dan jenis-jenis senjata lainnya .

d. Pesawat Pembom Berat (*Heavy Bomber*)

Untuk *heavy bomber*, berdasarkan protokol *The New START heavy bomber* adalah sebuah pesawat pembom berat yang dipersenjatai nuklir yang

dilengkapi dengan *long-range nuclear ALCMs* (*Air launch cruise missile*), *nuclear air to surface missiles*, dan bom nuklir. Semua *Deployed Heavy bomber* harus berada di pangkalan udara khusus yang didefinisikan sebagai pangkalan udara atau fasilitas tempat *heavy bomber* dilandaskan dan memiliki fasilitas operasional yang mendukung. Jika sebuah pangkalan udara tidak memiliki fasilitas pendukung operasional bagi *heavy bomber*, maka perjanjian tidak menganggap bahwa pangkalan tersebut masuk sebagai pangkalan yang sah untuk menampung *heavy bomber*. *Test heavy bombers* atau pesawat pembom berat yang hanya digunakan untuk test, hanya bisa di letakkan di pusat fasilitas pengujian penerbangan *heavy bomber* sedangkan untuk *undeployed heavy bombers* hanya bisa di letakkan di fasilitas perbaikan atau produksi untuk *heavy bombers*. Masing masing peserta perjanjian hanya boleh memiliki maksimal 10 *test heavy bomber*.

Dalam bagian ke tiga sub bagian ke lima protokol *The New START* menetapkan prosedur untuk eliminasi dan konversi *heavy bomber*. Pembom berat atau *heavy bomber* merupakan jenis pesawat yang memang di khususkan untuk membawa bom bom berdaya ledak besar atau nuklir.

Setiap pihak yang melebihi jumlah kepemilikan *heavy bomber* diharuskan untuk mengeliminasi *heavy bomber* dengan menghilangkan atau menghancurkan salah satu elemen dasar penerbangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memotong sayap, memotong bagian ekor, atau memotong badan pesawat menjadi dua. Dalam semua kasus, pemotongan harus dilakukan di lokasi yang jelas dan bukan pada sendi perakitan, sehingga tidak ada kemungkinan akan mudah terpasang lagi.

Prosedur juga menyatakan bahwa hasil eliminasi harus dapat dikonfirmasi menggunakan *National Technical Means of Verification (NTM)* ³⁷ oleh karena itu, potongan-potongan dari *heavy bomber* yang telah dihilangkan harus tetap bisa terlihat oleh *NTM* selama 60 hari setelah selesainya prosedur eliminasi yang

³⁷ *National technical means of verification* adalah tehnik untuk memantau guna memverifikasi item perjanjian diantaranya seperti menggunakan foto satelit, jaringan intelegen, radar, dan sensor-sensor tertentu. Penggunaan istilah *NTM* pertama kali terdapat pada *Strategic Arms Limitation Talk*. Laird, Melvin R. . 1972. "Memorandum for Assistant to the President for National Security Affairs, Subject: Revelation of the Fact of Satellite Reconnaissance in Connection with the Submission of Arms Limitation Agreements to Congress". <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB231/doc02.pdf> [16 Juli 2016]

dipilih. Ketika prosedur konversi selesai dan pemberitahuan telah siap diumumkan. *Heavy bomber* yang telah tidak dapat diterbangkan harus dipindahkan ke sebuah situs yang terlihat dan tersedia untuk inspeksi selama periode 30 hari.

Selain dengan metode eliminasi peserta perjanjian juga bisa mengurangi jumlah kepemilikan *heavy bomber* dengan mengkonversinya sehingga tidak lagi bersenjata nuklir. *Heavy bomber* yang tidak lagi dilengkapi *long-range nuclear ALCMs*, *nuclear air-to-surface missiles*, dan bom nuklir tidak akan menjadi item yang terhitung dalam batas perjanjian. Namun, perjanjian ini menentukan bahwa dalam jenis yang sama, *heavy bomber* yang dilengkapi untuk persenjataan nuklir harus dibedakan dari *heavy bomber* yang dilengkapi dengan persenjataan non nuklir. Jika peserta perjanjian telah mengkonversi beberapa *heavy bomber* bersenjata nuklir menjadi tidak lagi bersenjata nuklir maka *heavy bomber* yang telah dikonversi tidak boleh di tempung dalam tempat yang sama, kecuali peserta perjanjian telah setuju.

Oleh karena itu, Amerika Serikat bisa mengurangi jumlah *heavy bomber* di bawah batas perjanjian dengan mengubah beberapa *heavy bomber* Boeing B-52 sehingga tidak lagi mampu membawa senjata nuklir kemudian menampungnya di sebuah pangkalan terpisah dari *heavy bomber* yang masih membawa senjata nuklir.

2.2. Pemantauan dan Verifikasi

Dalam perjanjian *The New START* juga mengatur tentang pemantauan dan verifikasi yang menyerupai *START I*, pemantauan dan verifikasi dirancang untuk memungkinkan Amerika Serikat dan Rusia untuk mengumpulkan berbagai data tentang persenjataan dan kegiatan masing-masing sehingga akan dapat diketahui apakah peserta perjanjian melakukan kegiatan yang sesuai dengan aturan dan batas dalam perjanjian.

Perjanjian *New START* memiliki rezim pemantauan dan verifikasi yang menyerupai *START I* namun lebih murah dan sederhana. Dalam perjanjian *New START* mengandung segala definisi dan istilah yang detail terkait item yang terikat dalam perjanjian, ketentuan menggunakan *NTM* dalam memonitoring dan

menghitung kekuatan peserta perjanjian, database yang mencatat jumlah, jenis, dan lokasi item yang dibatasi oleh perjanjian, ketentuan pemberitahuan yang di butuhkan terkait item yang di batasi, dan inspeksi yang dibutuhkan untuk mengkonfirmasi informasi yang di bagikan saat pertukaran data.

Pada masa perumusan perjanjian, Amerika Serikat percaya diri bahwa mereka telah memiliki pemahaman mendalam tentang jumlah persediaan rudal yang dimiliki Rusia. Amerika telah menghitung dan memantau semua rudal milik Rusia selama 15 tahun sehingga mengurangi kecurigaan Amerika Serikat terhadap kemungkinan pelanggaran yang akan dilakukan oleh Rusia kedepannya. Walaupun Rusia sempat melakukan kecurangan dengan mengembangkan jenis rudal baru di tengah tengah berjalannya perjanjian *START I* sehingga rudal baru itu tidak masuk dalam item yang dibatasi kemungkinan rudal-rudal itu pastinya telah menua dan tidak terawat dan tidak mungkin lagi beroperasi³⁸. Merefleksikan hal tersebut rezim verifikasi dalam *New START* telah disederhanakan, dibuat hemat biaya dan lengkap dibandingkan rezim verifikasi di *START I*. Rezim verifikasi *New START* lebih memfokuskan nilai transparansi, kerjasama, dan keterbukaan saat pemeriksaan dan mendeteksi potensi pelanggaran.

Dalam Perjanjian *New START*, proses monitoring dan verifikasi dilakukan dengan beberapa cara diantaranya National Technical Means of Verification (*NTM*), Providing Telemetry Generated During Missile Flight Tests, dan On-Site Inspections

a. National Technical Means of Verification (NTM)

National technical means of verification adalah tehnik untuk memantau guna memverifikasi item perjanjian diantaranya seperti menggunakan foto satelit, jaringan intelegen, radar, dan sensor-sensor tertentu. Penggunaan istilah *NTM* pertama kali terdapat pada *Strategic Arms Limitation Talk* .³⁹

³⁸Russian Strategic Nuclear Forces. 2009. *Long Term Force Projection*. http://russianforces.org/blog/2009/01/long-term_force_projections.shtml [20 Oktober 2016]

³⁹SALT adalah perjanjian yang membatasi persenjataan strategis ofensif dan *Anti-balistic missile* . Perjanjian SALT berlangsung dua periode. SALT I ditandatangani pada 1969 dan SALT II ditandatangani pada 1972. Laird, Melvin R. . 1972. "*Memorandum for Assistant to the President for National Security Affairs, Subject: Revelation of the Fact of Satellite Reconnaissance in*

Aturaan penggunaan *NTM* terdapat pada pasal X dalam perjanjian *New START*. Peserta perjanjian menyatakan:

“...for the purpose of ensuring verification of compliance with the provisions of this Treaty, each Party shall use national technical means of verification at its disposal in a manner consistent with generally recognized principles of international law.” Selanjutnya peserta perjanjian juga menerangkan *“...not to interfere with the national technical means of verification of the other Party”* and *“not to use concealment measures that impede verification, by national technical means of verification, of compliance with the provisions of this Treaty.”*⁴⁰

Dalam proses verifikasi setiap peserta perjanjian harus menggunakan *NTM* dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang diakui. Selanjutnya peserta perjanjian dilarang untuk mengganggu sarana *NTM* peserta perjanjian lain dan tidak menggunakan usaha penyembunyian yang dapat menghambat verifikasi *NTM*. *START I* maupun *New START* sama-sama menyatakan bahwa dilarang melakukan usaha penyembunyian yang mengganggu *NTM* untuk menutupi hasil uji jarak tempuh, penyembunyian *ICBM*, *SLBM*, peluncur mobile *ICBM*, atau segala informasi terkait hasil uji *ICBM*, *SLBM* dan uji peluncurnya .

Oleh karena itu, meskipun perjanjian *New START* telah memiliki prosedur pertukaran data, eksepsi, dan inspeksi di tempat untuk membantu memantau senjata beserta kegiatannya, Namun peserta perjanjian tetap menggunakan *NTM* sebagai dasar dari rezim verifikasi.

b. Pertukaran Laporan Telemetri selama Uji Penerbangan Rudal

Ketika pengujian penerbangan *ICBM* dan *SLBM*, Amerika Serikat dan Rusia secara rutin melakukan pengukuran teknis tertentu dari rudal, seperti percepatan rudal, suhu, dan waktu yang dibutuhkan dalam tahap pemisahan. Data yang diperoleh dari pengukuran rudal selama uji penerbangan akan dikumpulkan .

Connection with the Submission of Arms Limitation Agreements to Congress .
<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB231/doc02.pdf> [16 Juli 2016]

⁴⁰U.S. Departement of State. 2010. *New START: Treaty Text*.
<https://www.state.gov/documents/organization/140035.pdf> [20 Oktober 2016]

Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menilai karakteristik kinerja dari sistem rudal. Data yang terkumpul tersebut disebut sebagai telematika, atau telemetri.

Selama negosiasi Perjanjian *New START*, Rusia sangat menentang ketentuan yang mengharuskan publikasi dan pertukaran telemetri dari setiap tes rudal penerbangan. Rusia berpendapat bahwa ketentuan ini tidak adil dan menciptakan kewajiban yang tidak merata. Karena Rusia sedang mengembangkan jenis rudal baru sehingga teknologi baru tentang perkembangan rudal akan juga didapat oleh Amerika Serikat lewat pertukaran data telemetri sementara Amerika Serikat hanya melakukan tes sesekali pada rudal tua. Atas dasar alasan ini Rusia menganggap perlu adanya aturan *New START* yang berbeda dari perjanjian *START I*.

Dalam perjanjian *START I* terdapat aturan tentang perlunya bagi para peserta perjanjian untuk dapat menilai dan membatasi parameter rudal seperti berat total, jumlah *reentry vehicle*, dan percepatan rudal. Parameter ini dapat lebih efektif dipantau dengan menganalisis informasi telemetri yang diperoleh selama tes penerbangan rudal. Oleh karena itu, kebutuhan untuk berbagi telemetri di setiap uji penerbangan adalah elemen penting dari rezim verifikasi *START* serta menjadi ukuran kepatuhan terhadap perjanjian, sehingga peserta perjanjian diwajibkan bertukar rekaman informasi telemetri yang dikumpulkan selama semua tes *ICBM* dan penerbangan *SLBM*, bersama dengan peralatan dan informasi yang diperlukan untuk menafsirkan dan menganalisis data yang tercatat.

Aturan *START I* tersebut memberatkan Rusia, oleh karena itu lewat proses negosiasi aturan dalam *New START* pun dirubah dan disesuaikan. Perjanjian tidak akan membatasi parameter rudal dan pengembangan jenis baru rudal sehingga tidak ada persyaratan untuk menentukan karakteristik teknis dari rudal baru seperti berat peluncur atau berat total untuk membedakan mereka dari jenis yang ada. Perjanjian *New START* juga tidak lagi menjadikan pertukaran telemetri pada setiap uji penerbangan sebagai ukuran kepatuhan terhadap perjanjian. Walaupun begitu, untuk menjunjung keterbukaan dan transparansi, peserta perjanjian sepakat untuk tetap saling bertukar informasi telemetri pada jumlah yang

disepakati (hingga lima tahun) yang meliputi jumlah peluncuran *ICBM* dan *SLBM*, serta kendaraan peluncuran ruang yang memanfaatkan *ICBM* atau *SLBM*, atau data telemetri tahap peluncuran pertama mereka. Aturan pertukaran telemetri terdapat pada bagian Ketujuh dari Protokol *The New START* yang terdiri dari tiga paragraf yang membentuk dasar untuk pertukaran informasi telemetri pada peluncuran *ICBM* dan *SLBM*.

Paragraf 1 mengimplementasikan ketentuan pasal IX dari Perjanjian bahwa Peserta perjanjian, dengan kesepakatan bersama, akan bertukar informasi telemetri atas dasar kesetaraan. Paragraf menentukan bahwa peserta perjanjian bertukar informasi telemetri pada jumlah yang sama terkait peluncuran *ICBM* dan *SLBM* setiap tahun kalender. Hal ini juga menetapkan jumlah maksimal lima peluncuran dari masing-masing peserta perjanjian yang informasi telemetrinya dapat ditukar dalam tahun kalender.

Paragraf 2 menetapkan kerangka dasar untuk pertukaran informasi telemetri. Peserta perjanjian akan diberikan kesempatan untuk bertemu dalam wadah komisi permusyawaratan bilateral atau *Bilateral Consultative Commission (BCC)* dalam 65 hari pertama setiap tahun kalender untuk membahas pertukaran informasi telemetri pada peluncuran *ICBM* dan *SLBM*. Pertemuan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta perjanjian untuk mendiskusikan peluncuran jenis apa yang informasi telemetrinya dapat ditukarkan. Meskipun ketentuan menyatakan bahwa diskusi tersebut akan fokus pada peluncuran *ICBM* dan *SLBM* yang dilakukan selama tahun kalender sebelumnya, namun tidak membatasi diskusi hanya pada peluncuran itu saja. Peserta perjanjian juga diberi fleksibilitas untuk memperluas diskusi tentang pertukaran informasi telemetri.

Setelah diskusi tercapai di *BCC*, para peserta perjanjian yang setuju pada jumlah peluncuran yang informasi telemetri akan ditukar, tunduk pada batas keseluruhan lima peluncuran untuk pertukaran setiap tahun kalender. Selanjutnya peserta perjanjian akan menentukan peluncuran apa saja yang akan dimintai laporan informasi telemetri. Aturan ini memberi hak utama peserta perjanjian untuk menentukan peluncuran apa saja yang akan bertukar informasi telemetri. Jika sudah disetujui dan menjadi keputusan akhir dalam *BCC* maka ruang lingkup

pertukaran informasi telemetri akan disesuaikan sebagai mana aturan dalam ayat 3.

Paragraf 3 menetapkan bahwa kondisi dan prosedur untuk pertukaran dan jumlah informasi telemetri yang tersedia akan ditentukan sesuai dengan Lampiran Informasi telemetri.

c. Inspeksi di Tempat (*On-Site Inspection*)

Inspeksi dalam *New START* akan mencakup dua tipe inspeksi di tempat dan eksepsi atau pameran sebagai bagian dari pemantauan komprehensif dan rezim verifikasi.⁴¹ Peserta perjanjian akan dapat melakukan inspeksi yang dijadwalkan untuk dimulai 60 hari setelah *New START* mulai berlaku, sehingga mereka akan dimulai pada awal April 2011.

1. Pemeriksaan Tipe Satu

Pemeriksaan tipe satu adalah inspeksi yang fokus terhadap situs atau fasilitas terkait *deployed* dan *undeployed* senjata strategis. Inspeksi ini dilakukan di pangkalan *ICBM*, pangkalan kapal selam, dan pangkalan udara tempat *deployed* atau *undeployed* rudal, dan *heavy bomber* berada. Inspeksi ini akan digunakan untuk mengkonfirmasi keakuratan data yang sebelumnya telah dilaporkan oleh pihak yang diperiksa. Data tersebut ialah jumlah dan jenis senjata offensif strategis yang menjadi item dan tunduk pada perjanjian ini baik yang berstatus *deployed* dan *undeployed*. Selama Pemeriksaan tipe satu, peserta perjanjian juga akan dapat mengkonfirmasi bahwa jumlah hulu ledak yang terletak di *ICBM* terpasang dan *SLBM* terpasang; dan jumlah persenjataan nuklir yang terletak di *heavy bomber* terpasang sesuai dengan angka yang tertera di database perjanjian. Berdasarkan *START I*, pemeriksaan jumlah senjata dan hulu ledak harus terjadi pada waktu yang berbeda dan dihitung menjadi dua kuota pemeriksaan. Sedangkan di bawah *New START*, inspeksi dapat terjadi pada saat

⁴¹ U.S Department of State. 2010. *Protocol to the New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)*. <https://www.state.gov/documents/organization/140047.pdf> [15 Oktober 2016]

yang sama dan hanya dihitung sebagai satu pemeriksaan terhadap kuota perjanjian⁴².

Inspeksi *reentry vehicle* di *New START* juga akan jelas berbeda dari inspeksi di *START I* karena aturan penghitungan untuk rudal balistik telah berubah. Pada perjanjian *START*, database perjanjian tercantum jumlah hulu ledak dikaitkan dengan jenis rudal, dan masing-masing rudal yang sejenis dianggap memiliki hulu ledak yang sama. Para peserta perjanjian kemudian memeriksa rudal dan mengkonfirmasi bahwa jumlah hulu ledak pada rudal jenis tertentu tidak melebihi jumlah umum pada jenisnya⁴³.

Database dalam *New START* akan mendaftarkan jumlah hulu ledak sebenarnya yang terpasang pada setiap rudal individu. *New START* tidak lagi menghitung setiap rudal dalam jenis tertentu seolah-olah semua rudal jenis tersebut membawa jumlah hulu ledak yang sama. *New START* akan menghitung jumlah hulu ledak yang terhitung dalam *ICBM* dan *SLBM* sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga dapat diketahui jumlah hulu ledak sebenarnya pada rudal-rudal tersebut. Selama pemeriksaan tipe satu, para peserta perjanjian akan memiliki hak untuk menunjuk satu *ICBM* atau satu *SLBM* secara acak untuk pemeriksaan, dan ketika memeriksa rudal itu, para peserta perjanjian akan dapat menghitung jumlah sebenarnya hulu ledak digunakan pada rudal. Peserta yang diperiksa tidak boleh melarang pihak pemeriksa atau menghalangi terpilihnya suatu rudal secara acak. Inspeksi ini memungkinkan para peserta perjanjian untuk menghitung jumlah aktual hulu ledak yang terpasang serta mampu meningkatkan transparansi dan pemahaman yang tidak tersedia pada perjanjian sebelum *New START*⁴⁴.

2. Pemeriksaan Tipe Dua

Berdasarkan aturan perjanjian *New START*, para peserta perjanjian akan melakukan pemeriksaan tipe dua di fasilitas yang menampung item *undeployed*

⁴² Amy F. Woolf. 2011. *Monitoring and Verification in Arms Control*. Washington, D.C: Congressional Research Service. HI m 32

⁴³ Ibid, hlm 14

⁴⁴ U.S Department of State. 2010. *Protocol to the New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)*. <https://www.state.gov/documents/organization/140047.pdf> [15 Oktober 2016]

atau peluncur dan rudal yang telah dikonversi. Inspeksi ini mengkonfirmasi jumlah *reentry vehicles* pada *deployed ICBMs* dan *deployed SLBMs*, mengkonfirmasi jumlah batas kepemilikan *undeployed launcher*, menghitung persenjataan nuklir yang terpasang pada *deployed heavy bombers*, mengkonfirmasi sistem konversi dan eliminasi, dan mengkonfirmasi fasilitas yang di eliminasi. Inspeksi ini dapat dilakukan di fasilitas pembuatan *ICBM*, fasilitas pembuatan *SLBM*, fasilitas penyimpanan untuk *ICBM*, *SLBM*, dan peluncur mobile *ICBM*, fasilitas perbaikan untuk *ICBM*, *SLBM*, dan peluncur mobile *ICBM*, fasilitas uji jarak tempuh dan fasilitas pelatihan⁴⁵.

Inspeksi jenis dua juga bertujuan untuk mengkonfirmasi keakuratan karakteristik teknis dan data yang telah dilaporkan sebelumnya terkait fasilitas khusus, jumlah dan jenis *undeployed ICBM* dan *undeployed SLBM*, tahap pertama *ICBM* dan *SLBM*, dan *undeployed ICBM launchers*. Inspeksi ini akan memberikan kesempatan bagi peserta perjanjian untuk mengkonfirmasi bahwa fasilitas tersebut tidak digunakan untuk tujuan tidak sesuai atau melanggar perjanjian. Selain itu, Inspeksi tipe dua juga akan mengkonfirmasi *ICBM* yang berbahan bakar padat, *SLBM* berbahan bakar padat, atau peluncur mobile *ICBM* telah di konversi sesuai dengan prosedur perjanjian.

Dengan adanya dua tipe inspeksi, Amerika Serikat dan Rusia akan diperbolehkan mengadakan 18 pemberitahuan inspeksi mendadak setiap tahun, yang mencakup 10 kali Inspeksi tipe Satu dan 8 kali inspeksi tipe dua. Pada dasarnya 18 inspeksi di *New START* setara dengan 28 inspeksi di *START I*, karena inspeksi tipe satu di *New START* mampu mencapai dua tujuan sekaligus, setara dengan inspeksi *reentry vehicle* dan inspeksi update data dalam *START I*. Oleh karena itu 18 inspeksi yang diperbolehkan di *New START* setara dengan 28 inspeksi dalam *START I* yang terdiri dari 10 Inspeksi *reentry vehicle*, 15 inspeksi update data dan item yang dicurigai, serta 3 inspeksi fasilitas ditinggalkan yang diumumkan sebelumnya⁴⁶.

⁴⁵U.S. Department of State. Op.Cit hlm 108-113

⁴⁶ Amy F. Woolf. 2017. *The New START Treaty: Central Limits and Key Provisions*. Washington DC: Congressional Research Service

3. Pameran atau Eksebis

Berdasarkan Bagian ke lima sub bagian ke VII protokol *New START*, “*exhibitions shall be conducted at the invitation of the Party conducting the exhibition, separately from inspections, at the locations and in the periods of time chosen by the Party conducting the exhibition.*”⁴⁷ Perjanjian *New START* tidak mengharuskan peserta perjanjian melakukan atau berpartisipasi dalam eksebis, tetapi adanya eksebis akan memberikan kesempatan bagi peserta perjanjian-peserta perjanjian untuk menunjukkan fitur yang membedakan dan mengkonfirmasi karakteristik teknis dari setiap jenis baru, varian, atau versi dari *ICBM*, *SLBM*, dan *heavy bomber* yang dilengkapi untuk persenjataan nuklir. Selain itu eksebis juga berguna untuk menunjukkan hasil konversi dari item pertama dari jenis peluncur *ICBM*, *SLBM* peluncur, atau *heavy bomber* dilengkapi untuk persenjataan nuklir. Eksebis pada akhirnya akan meyakinkan peserta perjanjian bahwa konversi tersebut mampu menghapus jenis peluncur atau *heavy bomber* dari akuntabilitas dalam perjanjian.

Para peserta perjanjian akan mendaftarkan fitur dan karakteristik teknis tersebut kedalam jenis rudal dan bom baru dalam database perjanjian. Pameran akan menambah transparansi kepada proses itu, dengan memberikan peserta perjanjian kesempatan untuk melihat dan memahami perbedaan antara sistem senjata, terutama bagi mereka yang telah dikonversi untuk penggunaan lain. Informasi yang di dapat dari eksebis akan dapat membantu dalam menghalangi atau mendeteksi pelanggaran perjanjian. Hal ini juga mendorong transparansi dan keterbukaan, dan dapat meningkatkan pemahaman tentang kemampuan senjata yang dibatasi oleh perjanjian.

2.3. Komisi Permusyawaratan Bilateral atau Bilateral Consultative Commission (BCC)

Komisi permusyawaratan bilateral atau *Bilateral Consultative Commission (BCC)* merupakan forum permusyawaratan yang menjadi wadah peserta perjanjian untuk bernegosiasi dan membahas suatu permasalahan. Berdasarkan

protokol perjanjian *New START* bagian ke enam *BCC* memiliki kewenangan sebagai berikut⁴⁸:

1. Menyelesaikan masalah terkait kepatuhan terhadap aturan perjanjian
2. Menyetujui langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan ketaatan dan efektivitas Perjanjian
3. Membahas fitur unik dari rudal dan peluncur selain *ICBM* dan peluncur *ICBM*, atau *SLBM* dan peluncur *SLBM*, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal V dari Perjanjian, sehingga akan menjelaskan perbedaan rudal tersebut dan peluncur mereka dari *ICBM* dan peluncur *ICBM*, atau *SLBM* dan peluncur *SLBM*
4. Membahas secara tahunan pertukaran informasi telemetri di bawah Perjanjian
5. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan senjata strategis baru dan mendiskusikan isu-isu lain yang diangkat oleh salah satu Pihak.

Selain wewenang diatas jika suatu saat diperlukan amandemen peserta perjanjian dapat menggunakan *BCC* sebagai wadah bernegosiasi terkait amandemen. Namun demikian, setelah bernegosiasi, amandemen tersebut hanya dapat berlaku hanya sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam perjanjian. Ini berarti bahwa amandemen akan tunduk pada saran dan persetujuan dari Senat Amerika Serikat. Ketentuan ini menjamin bahwa peran Senat dalam konstitusi sebagai pemberi masukan dalam pengambilan keputusan ratifikasi perjanjian tidak dirusak.

Sedangkan untuk aturan lain dalam *BCC* adalah⁴⁹ :

- *BCC* harus diadakan minimal dua kali dalam setahun di Geneva, Switzerland, atau tempat lain yang disetujui oleh peserta perjanjian.
- Proses negosiasi dalam *BCC* bersifat rahasia, kecuali peserta perjanjian setuju untuk mempublikasikan secara detail

⁴⁸ U.S. Department of State. 2010. *Protocol to the New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)*. <https://www.state.gov/documents/organization/140047.pdf> [21 Oktober 2016]

⁴⁹ Ibid. hlm 141

- Hasil kesepakatan *BCC* di catat secara tertulis dan tidak bersifat rahasia, kecuali peserta perjanjian menyetujui sebaliknya

Untuk keanggotaan dari *BCC* diatur di dalam protocol bagian enam pada ayat dua sebagai berikut⁵⁰:

1. Setiap pihak harus berkomunikasi melalui jalur diplomatik dalam menentukan nama Komisioner dan wakil Komisioner *BCC* masing-masing
2. Setiap pihak memiliki hak untuk diwakilkan dalam sesi *BCC* Oleh Komisioner dan wakil Komisioner beserta anggota lainnya, penasehat, dan staf ahli. Sesi *BCC* boleh diadakan tanpa kehadiran Komisioner maupun wakil Komisioner. Dalam kasus tersebut, setiap individu lain yang disebut dalam ayat ini diperbolehkan menjadi ketua perwakilan pengganti dalam sesi *BCC*.
3. *BCC* memiliki hak untuk membentuk kelompok kerja dari individual yang disebutkan pada paragraf dua untuk membahas secara spesifik isu-isu tertentu yang muncul pada sesi *BCC*.

Jika terdapat isu yang perlu dibahas maka sesi *BCC* harus diadakan maksimal 15 hari setelah permintaan salah satu pihak diajukan. Kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam mengangkat suatu isu. Isu yang di angkat harus dibahas dalam sesi *BCC*, namun dalam pemberian jawaban dan pencarian solusi kedua belah diberikan jangka waktu yang cukup untuk menyelesaikan isu dan berhak untuk mengatur ulang komposisi delegasi yang hadir dalam *BCC*.

Dalam protocol *New START* bagian enam ayat lima, proses berjalannya *BCC* bersifat rahasia kecuali ada kesepakatan lain yang di setujui bersama. *BCC* akan mencatat segala hasil keputusan sidang dan akan diterbitkan dalam dua Bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Rusia. Kedua teks harus sama dan

⁵⁰ U.S. Departement of State. Ibid. hlm 142

bersifat autentik. Teks tersebut bersifat tidak dirahasiakan kecuali terdapat kondisi tertentu yang disetujui bersama.⁵¹



⁵¹ U.S. Departement of State. Ibid, hlm 143

BAB 3. IMPLEMENTASI PERJANJIAN THE NEW START

Implementasi *New START* dimulai dengan adanya proses ratifikasi baik oleh Amerika Serikat maupun Rusia. Pada 13 Mei 2010 pemerintahan Obama menyerahkan teks perjanjian *New START* yang meliputi teks perjanjian, protokol, lampiran, analisis pasal-pasal yang telah disiapkan, dan 1.251 laporan rencana masa depan dan anggaran untuk persenjataan nuklir Amerika Serikat yang diperlukan oleh Kongres. Senat kemudian membahas perihal perjanjian *New START* tersebut guna memperoleh nasihat dan persetujuan untuk ratifikasi perjanjian dengan voting pada Resolusi Ratifikasi. Persetujuan perjanjian itu membutuhkan suara dari dua pertiga dari Senat, atau 67 Senator.

Senate of Foreign Relations Committee (Komite senat untuk hubungan luar negeri) menyelenggarakan 12 kali dengar pendapat tentang perjanjian itu. Ini dimulai pada bulan April 2009, melibatkan testimoni dari mantan Menteri Pertahanan William Perry dan James Schlesinger.⁵² Secara total, panitia menerima testimoni dari lebih dari 20 saksi baik dari dalam dan luar pemerintahan Obama. Panitia juga menerima kesaksian para pejabat senior saat ini dari Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Departemen Energi, dan dari beberapa mantan pejabat dari pemerintahan sebelumnya. Panitia menyelesaikan proses sidang pada pertengahan Juli, setelah menerima stimulasi laporan intelejen nasional tentang masa depan pasukan Rusia dan laporan tentang pemastian perjanjian.

Armed Services Committee (Komite Angkatan Bersenjata) kemudian juga mengadakan total delapan audiensi dan briefing pada perjanjian itu. *Armed Services Committee* mendengar kesaksian dari Sekretaris Negara Hillary Clinton, Menteri Pertahanan Robert Gates, Menteri Energi Steven Chu, dan Laksamana

⁵² Congress.gov. 2010. *Treaty with Russia on Measures for Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms*. <https://www.congress.gov/treaty-document/111th-congress/5> [14 februari]

Mike Mullen pada tanggal 17 Juni 2010. Hal ini juga menerima kesaksian dan briefing dari pejabat Administrasi lain dan dari para ahli dari luar pemerintah. Komite Intelijen juga menggelar sidang tertutup untuk membahas kemampuan pemantauan atau verifikasi Amerika Serikat dan pemastian perjanjian.

Senat Komite Hubungan Luar Negeri kemudian menyetujui Resolusi Ratifikasi dengan suara 14-4, dan mengirim resolusi tersebut pada seluruh senat. Namun Senat tidak mau membahas perjanjian tersebut sebelum pemilu November. Pemerintahan kemudian menekan Senat untuk memperdebatkan perjanjian selama sesi *lame duck*⁵³ kongres pada bulan Desember 2010. Banyak Senator mendukung tujuan ini. Namun beberapa senat mengatakan bahwa Senat tidak akan punya waktu untuk membahas perjanjian selama sesi *lame duck*, dan menunjukkan bahwa mereka lebih suka jika menunggu sampai 2011 untuk memperdebatkan perjanjian.

Setelah disetujui, Senat kemudian mulai membahas perjanjian *New START* pada 16 Desember 2010. Senat kemudian menyetujui ratifikasi perjanjian *New START* pada 22 Desember 2010 dengan perolehan 71 suara setuju dan 26 suara tidak setuju. Presiden Barack Obama kemudian menandatangani instrument ratifikasi pada awal bulan Februari 2011.

Proses ratifikasi juga berjalan di sisi Rusia, Presiden Medvedev menyerahkan perjanjian *New START* pada 20 Mei 2010. Kedua rumah parlemen Rusia, *The Duma* selaku majelis rendah dan *Federation Council* selaku majelis tinggi akan mengadakan voting yang kemudian menentukan suksesnya ratifikasi.

Pada awalnya *The Foreign Affairs Committee of the Russian Duma* (komite dari parlemen Duma Rusia urusan hubungan luar negeri) mendukung perjanjian ini. Namun demikian, pada awal bulan November 2010 Konstantin Kosachev selaku ketua komite menginginkan adanya peninjauan ulang terhadap perjanjian *New START*. Hal ini merupakan respon dari terhambatnya ratifikasi Amerika Serikat di masa *Lame Duck*. Setelah Senat Amerika Serikat sepakat

⁵³ *Lame duck* merupakan periode di saat pergantian posisi pemerintahan atau jabatan, masa ini dianggap kurang berpengaruh dalam politik karena pejabat telah berada di masa akhir jabatannya. Merriam-webster. 2016. *Lame duck*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/lame%20duck> [13 Februari 2016]

untuk menyetujui ratifikasi pada 22 Desember 2010, anggota parlemen Duma dengan segera melanjutkan proses ratifikasi. Mereka mendapatkan dokumen dari Senat Amerika pada tanggal 23 Desember, dan kemudian melaksanakan voting pertama pada tanggal 24 Desember. *The Duma* kemudian membuat amandemen dan mendeklarasikannya pada hukum federal dalam ratifikasi. Setelah dua kali proses voting selanjutnya, pada 25 Januari 2011 mereka pun menyetujui perjanjian *New START* dengan perolehan suara 350-96 dengan 1 abstain.⁵⁴

Majelis Tinggi parlemen Rusia atau *Federation Council*, juga ikut dalam proses voting ratifikasi perjanjian. Sergei Minorov selaku Ketua Dewan *Federation Council* menginginkan voting dilakukan setelah proses voting dalam parlemen *The Duma*.⁵⁵ Pada tanggal 26 Januari 2011, *Federation Council* secara bulat menyetujui ratifikasi perjanjian *New START*.⁵⁶ President Medvedev kemudian menandatangani ratifikasi pada tanggal 28 Januari 2011.

Setelah pertukaran instrument ratifikasi *New START* pada tanggal 5 February 2011 perjanjian dinyatakan berlaku dan peserta perjanjian segera memulai jadwal kegiatan yang telah diatur dalam perjanjian. Pada tanggal 22 Maret 2011, tepatnya 45 hari setelah perjanjian berlaku Amerika Serikat dan Rusia memulai pertukaran data. Mereka juga berhak melakukan Inspeksi di tempat dimulai pada awal April atau 60 hari setelah perjanjian berlaku. Dalam proses awal ini Amerika menampilkan teknis B-1B bomber dan Rusia menampilkan missile terbarunya yaitu RS 24.

Implementasi perjanjian *New START* kemudian dilanjutkan dengan Pertemuan pertama Komisi Permusyawaratan bilateral atau *Bilateral Consultative Commission (BCC)* yang diadakan di Jenewa dari 28 Maret sampai 8 April 2011. Selanjutnya implementasi perjanjian *New START* diwujudkan dengan pelaksanaan pengurangan kepemilikan persenjataan, pemantauan dan verifikasi, dan komisi bilateral konsultatif (*BCC*)

⁵⁴ Azernews. 2011. *Russian Duma gives approval to 'New START' nuclear weapons treaty*. <https://www.azernews.az/region/29048.html> [13 Februari 2016]

⁵⁵ News 24. 2010. *Russia welcomes Start treaty*. <http://www.news24.com/World/News/Russia-welcomes-Start-treaty-20101223> [13 Februari 2016]

⁵⁶ BBC News. 26 Januari 2011. *Russian Parliament Approves START Nuclear Arms Treaty*. <http://www.bbc.com/news/world-europe-12284532> [14 Februari 2016]

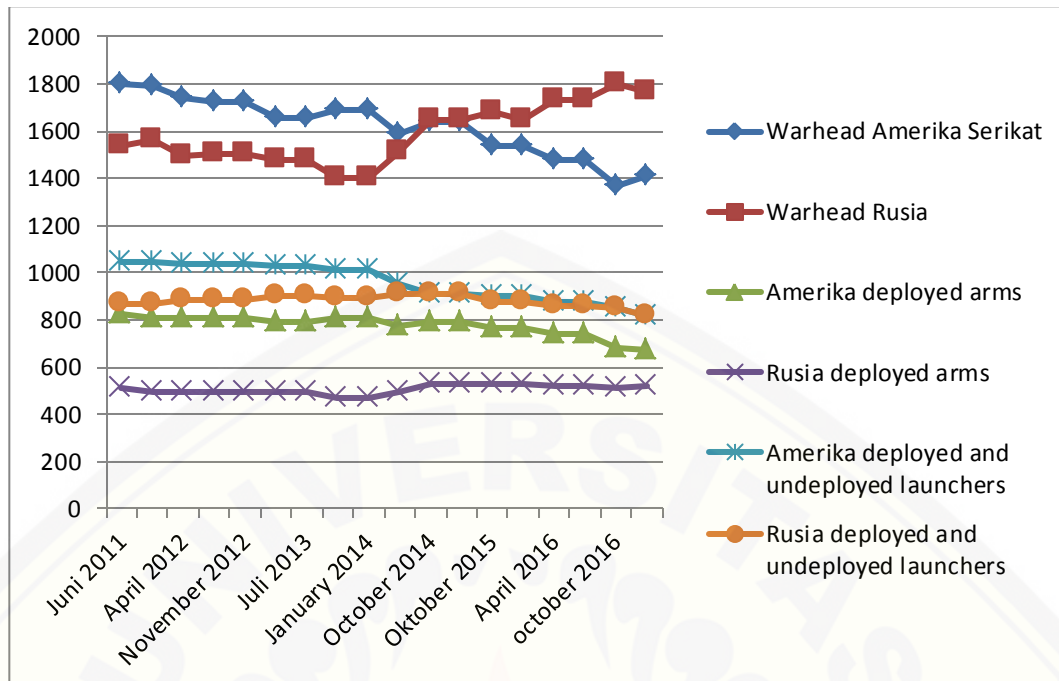
3.1. Pengurangan Kepemilikan Persenjataan

Perjanjian *New START* mengatur tiga batas maksimal kepemilikan persenjataan strategis yang harus dipenuhi baik oleh Rusia maupun Amerika Serikat. Batas pertama membatasi jumlah kepemilikan *deployed warheads* tidak lebih dari 1550 item. Batas ke dua membatasi jumlah kepemilikan *ICBM, SLBM*, dan *heavy bomber* yang berstatus *deployed* tidak lebih dari 700 item. Batas ketiga membatasi *ICBM launchers, SLBM launchers*, dan *heavy bomber* baik yang berstatus *deployed* maupun *undeployed* tidak lebih dari 800 item. Guna memenuhi batas kepemilikan tersebut, Amerika Serikat dan Rusia diwajibkan untuk melakukan upaya pengurangan senjata strategis. Amerika Serikat dan Rusia diharuskan mengurangi persenjataan strategisnya dalam jangka waktu tujuh tahun, mulai dari perjanjian berlaku hingga batas akhir bulan Februari 2018. Untuk mencapai batas kepemilikan persenjataan strategis Amerika Serikat dan Rusia diperbolehkan untuk memodernisasi, mengkonversi dan mengeliminasi persenjataan strategisnya.⁵⁷

Tabel 3.1. Upaya modernisasi, konversi, dan eliminasi Amerika Serikat dan Rusia.

Amerika Serikat	Rusia
Mengeliminasi <i>Phantom Launcher</i>	Mengeliminasi ICBM RS 19, SS-19, dan SS- 25
<i>De Mirving ICBM</i> Minuteman III	Modernisasi ICBM dengan mengembangkan ICBM baru yaitu RS 24
Mengkonversi Ohio-Class SSBN	Mengeliminasi <i>heavy bomber</i> Tu 90 dan Tu 160
Mengkonversi dan mengeliminasi B-52 <i>heavy bomber</i>	Modernisasi SLBM Bullava
Modernisasi <i>heavy bomber</i> dengan mengembangkan B-1B dan B 2	Mengembangkan Borei-Class SSBN dan mengeliminasi Delta III dan Delta IV SSBN

⁵⁷ U.S. Department of State. 2010. *New START*. <http://www.state.gov/t/avc/newstart/index.htm> [24 juli 2016]



Grafik 3.1. Perkembangan jumlah kepemilikan persenjataan strategis.⁵⁸

Berdasarkan pertukaran data pada tahun 2011 ketika perjanjian baru saja berlaku, Amerika Serikat tercatat memiliki 1.800 *warheads* yang terdapat pada 882 *deployed ICBMs*, *deployed SLBMs*, and *deployed heavy bombers* serta total 1.124 *launchers* yang terbagi dalam *deployed* dan *undeclared ICBMs* dan *SLBMs launchers*, serta *deployed* dan *undeclared heavy bombers*.⁵⁹ Sedangkan Russia dilaporkan memiliki 1.537 *warheads* yang terdapat pada 521 *deployed ICBMs*, *deployed SLBMs*, dan *deployed heavy bombers*. Russia juga dilaporkan memiliki total 865 dari *deployed* and *undeclared launchers*. Angka yang dimiliki Rusia tersebut sudah memenuhi batas perjanjian.

Pada laporan resmi selanjutnya di bulan September 2011, Amerika Serikat mengurangi jumlah kepemilikannya menjadi 1,790 *warheads* yang terdapat pada

⁵⁸ U.S. Department of State. 2017. *New START: Fact Sheet, View 2009-2017 Archived*. <https://www.state.gov/t/avc/newstart/c39906.htm> [21 maret 2017]

⁵⁹ U.S. Department of State. Juni 2011. *New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms : Fact Sheet, BUREAU OF ARMS CONTROL, VERIFICATION, AND COMPLIANCE*. <http://www.state.gov/t/avc/rls/164722.htm> . [28 Oktober 2016]

882 *deployed ICBMs, deployed SLBMs, and deployed heavy bombers*.⁶⁰ Serta mengurangi total *launcher* menjadi 1,043. Pengurangan sebanyak 81 *launcher* ini merupakan hasil dari proses konversi atau eliminasi “*phantom*” *launcher* yang sekarang tidak lagi bersenjata nuklir⁶¹. Pada sisi lain, Rusia dilaporkan memiliki 1,566 *deployed warheads* terbagi dalam 516 *deployed ICBMs, deployed SLBMs, dan deployed heavy bombers*. Jika dibandingkan laporan sebelumnya angka kepemilikan *warheads* Rusia bertambah dan melebihi batas perjanjian sedangkan jumlah total rudal berkurang. Walaupun jumlah *deployed ICBMs, deployed SLBMs, dan deployed heavy bombers* berkurang namun jumlah *warheads* Rusia malah bertambah. Hal ini disebabkan oleh dikerahkannya rudal baru MIRVed RS-24, yang masing-masing mampu membawa lebih banyak *warhead* dibandingkan Rudal SS-25 . Selain itu Rusia menambah jumlah *deployed dan undeployed launchers* yang sebelumnya berjumlah 865 menjadi 871.

Selanjutnya pada tanggal 1 April 2014, terjadi pengurangan yang sangat mencolok. Amerika Serikat tercatat memiliki hanya 1,585 *warheads* yang terdapat pada 778 *deployed ICBMs, deployed SLBMs, and deployed heavy bombers*, Amerika Serikat juga mengurangi *deployed and undeployed launchers* nya menjadi 952. Pada periode ini kedua negara sama sama berusaha mengurangi jumlah kepemilikannya, tidak hanya Amerika Serikat, Rusia dilaporkan telah mengurangi jumlah *warhead* mencapai dibawah batas menjadi 1512. Pengurangan *warhead* juga diikuti dengan pengurangan *deployed ICBMs, deployed SLBMs, and deployed heavy bombers* yang jauh berkurang menjadi 498, sedangkan untuk *launchers* jumlah kepemilikan Rusia bertambah menjadi 906 yang terdiri dari *deployed and nondeployed launchers*. Hal ini karena rudal-rudal lama yang dipensiunkan tidak lagi terhitung dalam perjanjian namun menyebabkan bertambahnya *launchers* yang berstatus *undeployed*. Walaupun *launchers* tersebut

⁶⁰ U.S. Department of State. September 2011. *New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms : Fact Sheet, BUREAU OF ARMS CONTROL, VERIFICATION, AND COMPLIANCE*. <http://www.state.gov/t/avc/rls/175945.htm> . [28 Oktober 2016]

⁶¹ Hans M. Kristensen. 2015. *US Drops Below New START Warhead Limit For The First Time*. <http://nukewatch.org/media2/postData.php?id=3498> . [30 Oktober 2016]

tidak lagi terpasang rudal namun selama belum dikonversi maka akan menambah jumlah *undeployed launcher*.⁶²

Namun demikian, berdasarkan data yang dipublikasikan pada tanggal 1 Januari 2015, yang mengacu pada pertukaran data tertanggal 1 September 2014, terjadi penambahan jumlah *warhead* oleh Amerika Serikat menjadi 794 *deployed ICBMs, deployed SLBMs, and deployed heavy bombers*, dengan total launcher 912 *deployed and nondeployed launchers*. Dengan adanya penambahan tersebut tercatat jumlah hulu ledak Amerika Serikat bertambah menjadi 1,642 *warheads*. Penambahan ini merupakan efek dari aktifnya kembali salah satu *Submerge Ship Ballistic Nuclear (SSBN)* yaitu *Ohio-Class SSBN*.⁶³ Walaupun bergitu penambahan jumlah kepemilikan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidaklah berlangsung lama. Pada bulan Oktober 2015 jumlah kepemilikan persenjataan strategis Amerika Serikat kembali menurun. Pengurangan disebabkan karena pada periode ini *SSBN* memasuki masa perawatan dan Amerika Serikat telah berhasil menyelesaikan proses “*de-MIRVing*”⁶⁴ pada *ICBM* nya, Sehingga tiap rudal Minuteman III saat ini hanya memiliki satu *warhead*.⁶⁵

Pada periode yang sama Russia dilaporkan menambah total *warheads* menjadi 1643 yang terpasang pada 528 *deployed ICBMs, deployed SLBMs, and deployed heavy bombers*, untuk angka *launcher* Rusia hanya mengurangi 1 *launcher*-nya sehingga total keseluruhan menjadi 911 tidak jauh berbeda dengan angka sebelumnya. Meningkatnya jumlah *warheads* Rusia bukan berarti Rusia sedang membangun kekuatan atau sengaja melanggar perjanjian namun merupakan bagian dari proses modernisasi persenjataan guna mempersiapkan persenjataan yang lama. Rusia telah merencanakan dalam beberapa decade untuk

⁶² Amy F. Woolf. 2011. *Entry into Force and Implementation: Reduction*. Washington, D.C: Congressional Research Service

⁶³ *Submerge Ship Ballistic Nuclear (SSBN)* adalah kapal selam yang bersenjata rudal ballistik dengan hulu ledak nuklir. The free dictionary. 2013. *Acronym: SSBN*. <http://acronyms.thefreedictionary.com/SSBN> [16 Juli 2016]

⁶⁴ *de-MIRVing* merupakan perubahan rudal yang awalnya memiliki sistem *Multiple Independent Reentry Vehicle* yang mampu mencapai multi target dengan banyak hulu ledak menjadi *single reentry vehicle* Dictionary of Defense. 2010. MIRV. <http://www.military-dictionary.org/DOD-Military-Terms/H/5/de-MIRVing> [16 Oktober 2016]

⁶⁵NTI. 2014. *U.S. Eliminates Multi-Warheads on All Ground-Based Nuclear Missiles*. <http://www.nti.org/gsn/article/us-pulls-multiple-warheads-all-nuclear-missiles/> [30 October 2016]

mempensiunkan lebih dari 240 rudal lama di era Uni Soviet, Namun demikian fase mempensiunkan rudal lama melambat yang awalnya 50 rudal pertahun menjadi hanya 20 rudal pertahun.

Pada saat yang sama , fase pengembangan *ICBM* bertambah dari 9 misil pertahun menjadi 18 pertahun. Pengembangan *deployed ICBM* ini lah yang menambah jumlah *warheads*. *Deployed ICBM* yang ditambahkan adalah SS-27 Mod 2 (RS-24) *ICBM*, yang akan menggantikan SS-25s (Topol). *Warheads* bertambah karena RS-24 masing masing membawa 4 *warheads* sedangkan yang SS-25 topol yang akan digantikan hanya memiliki 1 *warheads*. Pada Akhir tahun 2015 tercatat 54 misil RS-24 telah ditambahkan dan berstatus *deployed*. Fase memensiunkan rudal lama yang melambat sedangkan fase pengembangan dan penambahan *ICBM* ini lah yang menyebabkan bertambahnya jumlah *warheads* Rusia.⁶⁶

Berdasarkan data bulan April hingga bulan Juli 2016 tidak ada perubahan yang berarti. Amerika Serikat berhasil mencapai angka yang mendekati batas kepemilikan perjanjian yaitu 1,481 *warheads* yang terbagi dalam 741 *deployed ICBMs*, *deployed SLBMs*, dan *deployed heavy bombers*, dengan total jumlah *launcher* keseluruhan 878 baik *deployed* dan *undeployed launchers*. Angka ini berhasil dicapai karena pada September 2015, Angkatan Udara Amerika Serikat berhasil mengkonversi B-52H bomber yang awalnya bersenjata nuklir dikonversi menjadi bersenjata non nuklir. Hal ini menyebabkan senjata yang telah dikonversi tidak lagi menjadi item yang terhitung dalam perjanjian. Proses konversi dan eliminasi B-52H berhasil mengurangi sebanyak 30 *heavy bomber* yang terhitung dalam perjanjian *New START*.⁶⁷ Sedangkan Rusia masih bersemangat mengembangkan rudal-rudal barunya.

Semangat Rusia dalam mengembangkan sekaligus mengerahkan rudal-rudal baru malah membuat jumlah *warhead* semakin bertambah melewati batas

⁶⁶ Federation of Americans Scientist. 2015. *New START: Russia and the United States Increase Deployed Nuclear Arsenals*. <https://fas.org/blogs/security/2014/10/newstart2014/> [17 April 2017]

⁶⁷ Alert 5. 2015. *AFGSC completes first New START B-52 bomber conversion*. <http://alert5.com/2015/09/22/afgsc-completes-first-new-start-b-52-bomber-conversion/> . [30 Oktober 2016]

perjanjian. Pada bulan April hingga bulan Juli 2016 Rusia dilaporkan memiliki 1,735 warheads yang terpasang pada 521 *deployed ICBMs, deployed SLBMs, and deployed heavy bombers*. Untuk jumlah *launchers* Rusia berhasil mengurangi jumlah *deployed* dan *nondeployed launchers* dengan proses konversi dan eliminasi sehingga jumlah *launchers* pada laporan terakhir berkurang dari 911 menjadi 856.

Pada laporan yang dirilis pada bulan Oktober 2016. Angka kepemilikan *warheads* Rusia berbanding terbalik dengan Amerika Serikat. Rusia dilaporkan memiliki jumlah *Warhead* yang jauh melampaui batas dan mencapai angka tertinggi yaitu 1796 *warheads* sedangkan Amerika Serikat mampu mengurangi jumlah *warhead* nya menjadi hanya 1367 *warhead*. Pada periode ini kepemilikan *warheads* Rusia merupakan jumlah yang terbanyak sejak lima tahun terakhir sekaligus melampaui batas perjanjian sedangkan kepemilikan *warheads* Amerika Serikat merupakan yang terendah sejak lima tahun terakhir dan telah berada di bawah angka 1550 item sebagai batas maksimal perjanjian. Sedangkan untuk kepemilikan *Deployed ICBMs, Deployed SLBMs, dan Deployed Heavy Bombers* Amerika Serikat memiliki total keseluruhan sebanyak 681 item sedangkan Rusia memiliki 508 item kedua negara berhasil mencapai angka di bawah batas perjanjian yaitu 700 item. Pada kategori *launchers* jumlah kepemilikan antara Amerika Serikat dan Rusia hampir sama. Amerika Serikat memiliki total *launchers* sebanyak 848 item dan Rusia memiliki *launchers* sebanyak 847 item, untuk kategori *launchers* kedua negara nyaris mendekati angka batas perjanjian yaitu 800 item.

Pada laporan terakhir yang dirilis pada bulan April 2017 angka kepemilikan *warheads* Rusia mengalami penurunan yang sebelumnya 1796 menjadi 1765, 215 melebihi batas perjanjian yaitu 1550. Sedangkan Amerika Serikat menambah *warheads*-nya yang sebelumnya 1367 menjadi 1411, namun masih berada dibawah batas kepemilikan perjanjian. Untuk kategori *deployed ICBM, SLBM, dan heavy bomber* Amerika Serikat dan Rusia masih mempertahankan kepemilikannya di bawah batas angka 700 walaupun ada sedikit perubahan jumlah kepemilikan. Amerika Serikat mengurangi jumlah

kepemilikannya dari 681 menjadi 673 sedangkan kepemilikan Rusia bertambah dari 508 menjadi 523. Pada kategori *launchers* kedua negara sama-sama mengurangi jumlah kepemilikannya. Amerika Serikat mengurangi kepemilikan *launchers*-nya dari 848 menjadi 820 dan Rusia mengurangi jumlah kepemilikannya dari 847 menjadi 816. Angka kepemilikan *launchers* sudah sangat mendekati batas kepemilikan yaitu 800 *launchers*.⁶⁸

3.2. Pemantauan dan Verifikasi

Pemantauan dan verifikasi yang diatur dalam perjanjian *New START* telah memberikan rasa aman terhadap Amerika Serikat maupun Rusia sekaligus membentuk transparansi, dan stabilitas dengan Rusia perihal persenjataan strategis. Perjanjian ini memberikan hak dan wewenang bagi kedua belah pihak untuk melakukan inspeksi ditempat dengan tujuan saling memverifikasi informasi terkait persenjataan strategis.

Melalui inspeksi di tempat, kedua belah pihak akan saling memberikan akses untuk memverifikasi fasilitas persenjataan nuklir, *warheads*, dan sistem peluncuran senjata nuklir. Hal ini akan memberikan rasa saling percaya bahwa kewajiban pengurangan dan prosedur pengurangan telah dilakukan secara benar dan akan memenuhi target sampai tahun 2018.

Selama berjalannya proses pemantauan dan verifikasi tidak ada satupun keluhan yang terjadi, baik Amerika Serikat maupun Rusia sama-sama menunjukkan kepatuhan terhadap perjanjian *New START*. Pada laporan tahunan implementasi *the New START* tahun 2016, Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan bahwa “Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa Rusia telah mematuhi aturan aturan yang ada dalam perjanjian *New START*” laporan tersebut juga menyatakan bahwa “Amerika Serikat juga juga telah meningkatkan implementasi terkait isu dan tanya jawab dengan Rusia melalui jalur diplomasi dan dalam lingkup Komisi Konsultatis Bilateral (*BCC*).”⁶⁹

⁶⁸ U.S. Department of State. 2017. *New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms: Fact Sheet April 2017*. <https://www.state.gov/documents/organization/269651.pdf> [17 April 2017]

⁶⁹ U.S. Department of State. 2016. *Annual Report On Implementation Of The New Start Treaty*. <http://www.state.gov/t/avc/rls/rpt/2016/255558.htm> [20 Oktober 2016]

Kedua belah pihak mencatat bahwa dalam enam bulan pertama, mereka telah bertukar hampir 1.500 notifikasi dan telah melakukan demonstrasi terkait data informasi telemetrik. Kemudian pada akhir tahun pertama pelaksanaan, pada tanggal 5 Februari 2012, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 1.800 pemberitahuan. Mereka juga telah melakukan tiga pameran atau eksepsi yang diperlukan, Rusia memamerkan rudal RS-24 dan peluncurnya, dan Amerika Serikat memamerkan bomber B-1B dan B-2. Selama tahun 2012, kedua belah pihak juga telah melakukan semua 18 inspeksi yang diizinkan di fasilitas masing masing negara. Inspeksi tersebut terkait dengan kepemilikan *ICBM*, *SLBM*, markas *heavy bomber*; fasilitas penyimpanan, Fasilitas konversi dan penghapusan serta uji jarak tempuh.⁷⁰ Pada akhir November 2012, Departemen Luar Negeri melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Rusia juga telah menyelesaikan 18 inspeksi secara keseluruhan sebelum akhir tahun kedua pelaksanaan.

Untuk tahun berikutnya menurut Departemen Luar Negeri, Amerika Serikat dan Rusia telah menyelesaikan semua 18 inspeksi yang diizinkan selama enam tahun pelaksanaan perjanjian. Mereka terus melakukan inspeksi ini terlepas dari adanya ketegangan terkait peristiwa aneksasi Rusia dari Crimea dan agresi melawan Ukraina pada awal 2014. Kedua belah pihak juga telah bertukar 12.500 notifikasi mengenai lokasi, gerakan, dan status kekuatan nuklir serta menyelesaikan 13 pameran untuk menunjukkan perbedaan fitur dan karakteristik teknis dari senjata offensive strategis jenis baru serta menunjukkan hasil konversi dari persenjataan strategis. Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan pemantauan dan verifikasi, semua inspeksi dalam kurun enam tahun yaitu tahun 2011 hingga 2017 telah dilaksanakan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh kedua belah pihak. ⁷¹

⁷⁰ Arms control today . 2016. *Russia Relies on Satan to Keep New START Data Exchange Numbers Up*. <http://www.armscontrol.org/blog/ArmsControlNow/2016-04-06/Russia-Relies-on-Satan-to-Keep-New-START-Data-Exchange-Numbers-Up> [16 maret 2017]

⁷¹U.S. Department of State. 2016. *New START Treaty Fifth Anniversary*. <https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/2016/252206.htm>

3.3. Komisi Permusyawaratan Bilateral atau Bilateral Consultative Commission (BCC)

Sampai bulan Januari 2017, Amerika Serikat dan Rusia telah melakukan pertemuan melalui forum *BCC* mencapai sebanyak 12 kali pertemuan⁷². Dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2017 yaitu 6 tahun kedua belah pihak telah mengadakan 12 kali pertemuan maka dapat dinyatakan bahwa ketentuan minimal mengadakan pertemuan *BCC* telah dimanfaatkan dengan baik oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam protokol perjanjian *New START* bagian ke enam yang menyatakan bahwa *BCC* harus diadakan minimal dua kali dalam setahun.⁷³ Namun, dari 12 pertemuan tersebut tidak banyak *press release* yang diterbitkan dalam menggambarkan proses negosiasi *BCC*. Sesi pertemuan dan negosiasi dalam forum *BCC* diadakan secara bilateral dan tertutup. Kedua belah pihak hanya menerbitkan beberapa *press release* yang bisa diakses publik terkait agreement dan isu-isu penting tertentu yang penerbitannya di legalkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak menghormati aturan *BCC* yang telah diatur oleh protokol perjanjian *New START* bagian enam ayat lima yang menyatakan bahwa proses negosiasi dalam *BCC* bersifat rahasia, kecuali peserta perjanjian setuju untuk mempublikasikan secara detail dan hasil kesepakatan *BCC* di catat secara tertulis dan tidak bersifat rahasia, kecuali peserta perjanjian menyetujui sebaliknya.⁷⁴

Tabel 3.2. Pertemuan BCC

Pertemuan BCC	Waktu Pelaksanaan	Pembahasan
First Session	Maret-April 2011	Pertemuan rutin dan pertukaran data kepemilikan persenjataan
Second Session	Oktober 2011	Pertemuan rutin dan pertukaran data kepemilikan persenjataan

⁷² 2009-2017 Archive for the U.S. Department of State. 2012. *Twelfth Session of the Bilateral Consultative Commission under the New START Treaty*. <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/10/263267.htm> [19 februari 2017]

⁷³ U.S. Department of State. 2010. *Protocol to the New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)*. <https://www.state.gov/documents/organization/140047.pdf> [21 Oktober 2016]

⁷⁴ U.S. Department of State. Ibid hlm 142

Third Session	Januari-Februari 2012	Pertemuan rutin, pertukaran data kepemilikan persenjataan, dan menghasilkan <i>Agreement</i> BCC no 1 dan no 2
Fourth Session	September 2012	Pertemuan rutin, pertukaran data kepemilikan persenjataan, dan menghasilkan <i>Agreement</i> no 3 dan no 4
Fifth Session	April 2013	Pertemuan rutin dan pertukaran data kepemilikan persenjataan
Sixt Session	Oktober 2013	Pertemuan rutin dan pertukaran data kepemilikan persenjataan
Seventh Session	Januari-Februari 2014	Pertemuan rutin, pertukaran data kepemilikan persenjataan, dan menghasilkan <i>Agreement</i> no 5
Eighth Session	Oktober 2014	Pertemuan rutin dan pertukaran data kepemilikan persenjataan
Ninth Session	April 2015	Pertemuan rutin dan pertukaran data kepemilikan persenjataan
Tenth Session	Oktober 2015	Pertemuan rutin dan pertukaran data kepemilikan persenjataan
Eleventh Session	April 2016	Pertemuan rutin dan pertukaran data kepemilikan persenjataan
Twelfth Session	Oktober 2016	Pertemuan rutin dan pertukaran data kepemilikan persenjataan

Press release yang diterbitkan terkait beberapa *agreement* yang disepakati kedua belah pihak. Pada tanggal 7 Februari 2012, BCC menghasilkan *agreement* no 1 dan 2 tertanggal 7 Februari 2012. Kedua belah pihak menyetujui beberapa kesepakatan terkait pertukaran data telemetri peluncuran rudal. *Agreement* no 1

yaitu setuju untuk melakukan pertukaran data telemetri pada saat peluncuran *ICBM* dan *SLBM* pada tanggal 5 Februari 2011, ketika perjanjian mulai aktif sampai akhir 2011 serta mendemonstrasikannya⁷⁵. *Agreement* no 2 yaitu menyetujui periode atau tahapan tertentu dari peluncuran ketika mereka harus memulai dan mengakhiri pertukaran data telemetri selama uji peluncuran *ICBM* atau *SLBM*.⁷⁶

Kemudian *BCC* pada bulan September 2012 menghasilkan *Agreement* no 3 dan no 4 tertanggal 21 september 2012. *Agreement* no 3 yaitu menyetujui prosedur yang akan digunakan ketika mendemonstrasikan media perekam dan alat presentasi ketika menampilkan data telemetri. Rusia menggunakan *RS120/E5 playback device* sedangkan Amerika Serikat menggunakan wideband *DRS8200X*.⁷⁷ *Agreement* no 4 kedua belah pihak menyetujui penggunaan *tamper detection equipment* sebagai pendeteksi kecurangan selama inspeksi langsung. Hal ini untuk mencegah adanya perubahan data yang diberikan sebelumnya dirubah diam diam melalui media computer sehingga membuat data saat inspeksi langsung tidak valid⁷⁸.

BCC pada bulan Januari 2014, menghasilkan *Agreement* no 5 tertanggal 28 February 2014. *Agreement* no 5 yaitu menyetujui penggunaan alat pengukur tambahan saat inspeksi reentry vehicle pada *Trident II*. Saat pemeriksaan reentry Vehicle maka akan ada pembongkaran yang dilakukan oleh Rusia, demi menjaga kualitas rudal Amerika Serikat diperbolehkan menggunakan alat pengukur tambahan saat pemasangan kembali sesaat setelah diperiksa. Alat ini digunakan untuk mengukur jarak penutup terhadap jarak motor tahap tiga supaya sama

⁷⁵ 2009-2017 Archive for the U.S. Department of State. 2012. *Bilateral Consultative Commission: Agreement Number 1*. <https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/183540.htm> [16 Oktober 2016]

⁷⁶ 2009-2017 Archive for the U.S. Department of State. 2012. *Bilateral Consultative Commission: Agreement Number 2*. <https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/183541.htm> [19 Oktober 2016]

⁷⁷ 2009-2017 Archive for the U.S. Department of State. 2012. *Bilateral Consultative Commission: Agreement Number 3*. <https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/198081.htm> [19 Oktober 2016]

⁷⁸ 2009-2017 Archive for the U.S. Department of State. 2012. *Bilateral Consultative Commission: Agreement Number 4*. <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/198300.pdf> [19 Oktober 2016]

dengan saat sebelum dibongkar. Rusia sebagai pemeriksa tetap diperbolehkan menyaksikan hingga proses pemasangan kembali selesai.⁷⁹



⁷⁹ 2009-2017 Archive for the U.S. Department of State. 2012. *Bilateral Consultative Commission: Agreement Number 5*. <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/223931.pdf> [20 Desember 2016]

BAB 5. KESIMPULAN

The New START adalah perjanjian antara Amerika Serikat dan Rusia yang memiliki nama resmi *Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms*. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 8 April 2010 di Praha. Setelah diratifikasi perjanjian ini mulai diterapkan sejak tanggal 5 Februari 2011 dan akan berlaku sampai tanggal 5 february 2021. Perjanjian ini terbentuk dilatarbelakangi oleh kesadaran akan dibutuhkananya *arm control* antara Amerika Serikat dan Rusia terutama dibidang persenjataan nuklir strategis. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari rezim perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian *START I* dan *Moscow Treaty (SORT)*. Oleh karena itu perjanjian ini memiliki dua tujuan utama yang sama yaitu pengurangan persenjataan nuklir strategis (*disarmament*) serta pemantauan dan verifikasi.

Sejak berlakunya rezim perjanjian *New START* hingga tahun 2017 tidak ada masalah yang sulit untuk dipecahkan (*problem malignancy*) yang terjadi. Semua isu terkait perjanjian dapat diselesaikan dengan mekanisme *problem solving* yang baik. Permasalahan rumit yang dapat menimbulkan perpecahan (*cumulative cleavage*) tidak terjadi. Tidak adanya *problem malignancy* dan baiknya mekanisme *problem solving* kemudian berpengaruh positif terhadap nilai efektifitas perjanjian.

Rezim *New START* bernilai efektif karena terpenuhinya *output (Sr)*, *outcome (Cr)*, dan *impact (Br)*. *Output* rezim perjanjian *New START* mencapai *output* level dua yaitu rezim berhasil menjadi rangkaian aturan resmi yang ditandatangani dan diratifikasi oleh kedua pihak serta diikuti dengan langkah-langkah domestik mentaati aturan perjanjian. *Outcome* rezim perjanjian *New START* juga bernilai positif ditandai dengan adanya perubahan perilaku dari kedua belah pihak semenjak perjanjian berlaku. Perubahan perilaku tersebut ditandai dengan ditinggalkannya aturan-aturan lama dalam perjanjian *START I* dan *SORT* serta diterapkan dan diimplementasikannya aturan-aturan baru dalam

perjanjian *New START*. Nilai *output* dan *outcome* yang positif mendukung adanya dampak (*impact*) yang bernilai positif juga dalam rezim perjanjian *New START*. Hal ini dibuktikan dengan adanya dampak yang selaras dengan tujuan utama. Dampak positif tersebut yaitu:

1. Lancarnya pelaksanaan pemantauan dan verifikasi terkait pelaksanaan inspeksi ditempat, eksepsi, dan *BCC*
2. Hampir terpenuhinya batasan kepemilikan pada tahun 2017, dan masih ada waktu untuk mengeliminasi dan mengkonversi hingga batas akhir bulan Februari 2018
3. Memperkuat posisi kepemimpinan Amerika Serikat dan Rusia dalam NPT dan dewan keamanan PBB
4. Mampu mempengaruhi NATO dan memperkaya aturan NATO terkait *Active Layered Theater Ballistic Missile Defense (ALTBM D)*.
5. Tujuan utama rezim juga memperkuat rezim NPT dan mampu mempengaruhi negara NWS lainnya untuk melakukan pengurangan persenjataan strategis serta mulai menerapkan tata cara penghitungan dan nilai transparansi dalam *New START* terkait persenjataan nuklir yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian ini, efektivitas rezim internasional dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar aktor dan mekanisme *problem solving* yang ada didalamnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dalam suatu rezim internasional dibutuhkanlah kualitas hubungan yang baik antar aktor dalam rezim, tujuan utama yang kongkrit didasari oleh kepentingan yang sama dari para aktor, dan perangkat aturan yang rinci dan jelas yang dilengkapi dengan mekanisme *problem solving* didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amy F. Woolf. 2011. *Monitoring and Verification in Arms Control*. Washington, D.C: Congressional Research Service

_____.2011. *Entry into Force and Implementation: Reduction*. Washington, D.C: Congressional Research Service

_____. 2016. *Monitoring and Verification in Arms Control*. Washington, D.C: Congressional Research Service

_____. 2017. *The New START Treaty: Central Limits and Key Provisions*. Washington DC: Congressional Research Service

Darmawan, Arif. 2007. *Efektivitas Rezim Non-Proliferation Treaty (NPT) dalam menghadapi isu Proliferasi senjata nuklir*. Yogyakarta: Universitas Gajahmada

Evans, Gareth & Takur, Ramesh. 2015. *Nuclear Weapons: The State of Play 2015*. Australia: Crawford School of Public Policy The Australian National University

Hurley, Jennifer A. 1999. *Weapons Of Mass Destruction*. Michigan: Green Haven press

Jastrow, Robert. 1985. *How to Make Nuclear Weapon Obsolete*. Toronto: Little, Brown and Company

Kiles, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2016. *Trends in World Nuclear Forces,2016*. Stockholm: SIPRI

Krasner, Stephen D. 1982. *"Internasional Regime"*. New York, Cornell University Press

Miles, Edwards L. *Environmental Regime Effectiveness*. London: the MIT press Cambridge

Podvig, Pavel. 2012. *Practical Steps Towards Transparency of Nuclear Arsenal*. Wimbledon: UNIDIR

Siagian, S. P. 1991, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta:Gunung Agung

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Tung, Dam T. 2011. *The New START Treaty and the impacts to the US – Russian relations*. Brno:MASARYK UNIVERSITY

Jurnal, Serial Online dan Working Paper

Kristensen, Hans M. & Norris, Robert. 2011. *US nuclear forces, 2011*. Bulletin of Atomic Scientist. Volume 67 isu 2 lihat <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1177/0096340211400050>

_____. 2011. *Chinese nuclear forces, 2011*, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 67, no. 6

_____. 2012. *Russia Nuclear Forces, 2012*. Bulletin of The Atomic Scientist. Vol. 68 isu 2. Lihat <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1177/0096340212438665>

_____. 2014. *Russia Nuclear Forces, 2014*. Bulletin Of The Atomic Scientist. Vol 20 isu 2 <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1177/0096340214523565>

_____. 2017. *Russia Nuclear Force 2017*. Bulletin of Atomic Scientist volume 73. Issu 2

Morgenthau, Hans J. 1964. *The four Paradox of Nuclear Strategy*. The American Political Science Review. Vol 58 no 1

Oznobishchev, Sergey. 2009. *Prospects for U.S.-Russian Arms control and Disarmament: A Russian Perspective*. Strategic Insights, Volume VIII, Issue 4. Lihat <https://www.hsdl.org/?view&did=791506>

Puchalla, Donald J. dan Hopkins, Raymon F. Spring, 1982. *International Organization*. Internasional Regimes, vol 36. London: The MIT press

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

United Nations Document. 2010. *U. S. DELEGATION to the 2010 Nuclear NONPROLIFERATION TREATY REVIEW CONFERENCE*.
<https://www.state.gov/documents/organization/141503.pdf>

U.S. Departement of State. 2010. *New START: Treaty Text*.
<https://www.state.gov/documents/organization/140035.pdf>

_____. 2010. *Protocol to the New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)*. <https://www.state.gov/documents/organization/140047.pdf>

Internet

2009-2017 Archive for the U.S. Department of State. 2012. *Bilatera Consultative Commission: Agreement Number 1*. <https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/183540.htm>

_____. 2012. *Bilateral Consultative Commission: Agreement Number 2*.
<https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/183541.htm>

_____. 2012. *Twelfth Session of the Bilateral Consultative Commission under the New START Treaty*. <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/10/263267.htm>

_____. 2012. *Bilateral Consultative Commission: Agreement Number 3*.
<https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/198081.htm>

_____. 2012. *Bilateral Consultative Commission: Agreement Number 4*.
<https://2009-2017.state.gov/documents/organization/198300.pdf>

_____. 2012. *Bilateral Consultative Commission: Agreement Number 5*.
<https://2009-2017.state.gov/documents/organization/223931.pdf>

Alert 5. 2015. *AFGSC completes first New START B-52 bomber conversion*.
<http://alert5.com/2015/09/22/afgsc-completes-first-new-start-b-52-bomber-conversion/>

Arms control Association. 2017. *Nuclear weapons: who hAs what a glance*.
<https://www.armscontrol.org/factsheets/NuclearweaponswhohAswhat>

Arms Control Center. 2010. *Treaty Between The United States Of America And The Russian Federation On Measures For The Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms*. <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/treaty-between-the-united-states-of-america-and-the-russian-federation-on-measures-for-the-further-reduction-and-limitation-of-strategic-offensive-arms/>

_____. 2010. *Limitation Of Strategic Offensive Arms*. http://amscontrolcenter.org/assets/pdfs/START_Briefing_Book_4-6-2010.pdf

Arms control today . 2016. *Russia Relies on Satan to Keep New START Data Exchange Numbers Up*. <http://www.armscontrol.org/blog/ArmsControlNow/2016-04-06/Russia-Relies-on-Satan-to-Keep-New-START-Data-Exchange-Numbers-Up>

Atomic archive. 1991. *Arms control Treaty: START I*. <http://www.atomicarchive.com/Treaties/Treaty17.shtml> [20 maret 2017]

_____. 2002. *Arms control Treaty: SORT*. <http://www.atomicarchive.com/Treaties/Treaty21.shtml> [20 maret 2017]

Azernews. 2011. *Russian Duma gives approval to `New START` nuclear weapons treaty*. <https://www.azernews.az/region/29048.html>

BBC News. 26 januari 2011. *Russian Parliament Approves START Nuclear Arms Treaty*. <http://www.bbc.com/news/world-europe-12284532>

Congress.gov. 2010. *Treaty with Russia on Measures for Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms*. <https://www.congress.gov/treaty-document/111th-congress/5>

Defenfetch. 2011. *Russia Planning 10 years, \$640 billion Military Modernization*. <https://www.defensetech.org/2011/02/25/russia-planning-10-year-640-billion-military-modernization/>

Defense Innovation Marketplace. 2014. *AIR FORCE GLOBAL STRIKE COMMAND 2014 STRATEGIC MASTER PLAN*. <http://www.defenseinnovationmarketplace.mil/resources/AFGS-2014StrategicPlan.pdf>

Department of Defense Joint Doctrine Division. 2007. *Dictionary of Military and Associated Term*. <http://www.military-dictionary.org/International-Relations-and.../warhead>

Department of International relations and European studies. 2007. *The New START Treaty and the impacts to the US – Russian relation*. https://is.muni.cz/th/274618/fss_b/Bachelor_work_274618.pdf

Federation Of americans Scientist. 1998. *Intercontinental weapons*. <https://fas.org/nuke/intro/missile/icbm.htm>

_____. 2010. *New START has New Counting*. <https://fas.org/blogs/security/2010/03/newstart/>

_____. 2015. *New START: Russia and the United States Increase Deployed Nuclear Arsenals*. <https://fas.org/blogs/security/2014/10/newstart2014/>

_____. 2015. *US Drops Below New START Warhead Limit For The First Time*. <https://fas.org/blogs/security/2015/10/newstart2015-2/>

_____. 2017. *New START 2017: Russia Decreasing, US Increasing Deployed Warheads*. <https://fas.org/blogs/security/2017/04/newstart2017/>

Franks Muger Atomic City Underground. 2015. *A chilly moment at Nuclear Deterrence Summit*. <http://knoxblogs.com/atomiccity/2015/02/18/a-chilly-moment-at-nuclear-deterrence-summit/>

Internasional Atomic Energy Agency. 1953. *Atoms for peace speech*. <http://www.iaea.org/about/history/atoms-for-peace-speech>

Kristensen, Hans M. 2015. *US Drops Below New START Warhead Limit For The First Time*. <http://nukewatch.org/media2/postData.php?id=3498>

_____. 2015. *US Drops Below New START Warhead Limit For The First Time*. <http://nukewatch.org/media2/postData.php?id=3498>

Laird, Malvind R. 1972. *Memorandum for assistant to President For National security Affairs, Subject: Revelation of the Fact of Satellite Reconnaissance in Connection with the Submission of Arms Limitation Agreement to Congress*. <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB231/doc02.pdf>

- News 24. 2010. *Russia welcomes Start treaty.*
<http://www.news24.com/World/News/Russia-welcomes-Start-treaty-20101223>
- NTI. 2014. U.S. *Eliminates Multi-Warheads on All Ground-Based Nuclear Missiles.*
<http://www.nti.org/gsn/article/us-pulls-multiple-warheads-all-nuclear-missiles/>
- Presiden Of Rusia. 2008. *The Foreign Policy Concept of the Russian Federation.*
<http://en.kremlin.ru/supplement/4116>
- Reuters. 2017. *Exclusive: In call with Putin, Trump denounced Obama-era nuclear arms treaty – source.*
<http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-putin-idUSKBN1502A5>
- RT. 2016. *Russia to Disarm World's Largest Nuclear Ballistic Missile Submarine.*
<https://www.rt.com/news/335300-russia-disarms-nuclear-sub/>
- Russian Strategic Nuclear Forces. 2009. *Long Term Force Projection.*
http://russianforces.org/blog/2009/01/long-term_force_projections.shtml
- Sputnik News. 2015. *U.S Says Cooperation With Russia On New START Treaty is “Silver Lining”* .
<https://sputniknews.com/politics/201504171021006521/>
- The Centre of Arms Control and non-Proliferation. 2008. *In a Nutshell : McCain vs Obama in National Security.*
<http://armscontrolcenter.org/in-a-nutshell-mccain-vs-obama-on-national-security-3/>
- The free dictionary. 2013. *Acronym: SSBN.*
<http://acronyms.thefreedictionary.com/SSBN>
- The Washington Free Beacon. 2016. *Russia Adds warheads Under New START.*
<http://freebeacon.com/national-security/russia-adds-hundreds-warheads-nuclear-treaty/>
- The White House President Barack Obama. 2009. *Joint Statement by Dmitriy A. Medvedev, President of the Russian Federation, and Barack Obama, President of the United States of America, Regarding Negotiations on Further Reductions in Strategic Offensive Arms.*
<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/joint-statement-dmitriy-a-medvedev-president-russian-federation-and-barack-obama-pr>

- The World Reporter. 2014. *Comparative Study of EU, US and Russian Security Strategies*. <http://www.theworldreporter.com/2014/06/comparative-study-eu-us-russian-security-strategies.html>
- U.S. Department of State. 2010. *The New START*. <http://www.state.gov/t/avc/newstart/index.htm>
- _____. 2010. *Prospects for U.S.-Russia Missile Defense Cooperation*. <https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/142329.htm>
- _____. 2010. *The Case for New START Ratification*. <http://www.state.gov/t/us/140633.htm>
- _____. 2010. *Prospects for U.S.-Russia Missile Defense Cooperation*. <https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/142329.htm>
- _____. 2010. *U.S.-Russian Relations: First Year of the Obama Administration*. <https://2009-2017.state.gov/p/eur/rls/rm/2010/140850.htm>
- _____. Juni 2011. *New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms : Fact Sheet, BUREAU OF ARMS CONTROL, VERIFICATION, AND COMPLIANCE*. <http://www.state.gov/t/avc/rls/164722.htm>
- _____. September 2011. *New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms : Fact Sheet, BUREAU OF ARMS CONTROL, VERIFICATION, AND COMPLIANCE*. <http://www.state.gov/t/avc/rls/175945.htm>
- _____. 2013. *The Sixth Session of the Bilateral Consultative Commission under the New START Treaty*. <https://geneva.usmission.gov/2013/11/21/the-sixth-session-of-the-bilateral-consultative-commission-under-the-new-start-treaty/>
- _____. 2014. *Ukraine and Russia Sanctions*. <https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/ukrainerussia/>
- _____. 2016. *Annual Report On Implementation Of The New Start Treaty*. <http://www.state.gov/t/avc/rls/rpt/2016/255558.htm>
- _____. 2016. *New START Treaty Fifth Anniversary*. <https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/2016/252206.htm>

_____. 2017. *New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms: Fact Sheet April 2017*.
<https://www.state.gov/documents/organization/269651.pdf>

_____. 2017. *New START: Fact Sheet, View 2009-2017* Archived.
<https://www.state.gov/t/avc/newstart/c39906.htm>



TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN
FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND
LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

The United States of America and the Russian Federation,
hereinafter referred to as the Parties,

Believing that global challenges and threats require new
approaches to interaction across the whole range of their
strategic relations,

Working therefore to forge a new strategic relationship
based on mutual trust, openness, predictability, and
cooperation,

Desiring to bring their respective nuclear postures into
alignment with this new relationship, and endeavoring to
reduce further the role and importance of nuclear weapons,

Committed to the fulfillment of their obligations under
Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons of July 1, 1968, and to the achievement of the
historic goal of freeing humanity from the nuclear threat,

Expressing strong support for on-going global efforts in
non-proliferation,

Seeking to preserve continuity in, and provide new impetus
to, the step-by-step process of reducing and limiting nuclear
arms while maintaining the safety and security of their
nuclear arsenals, and with a view to expanding this process in
the future, including to a multilateral approach,

Guided by the principle of indivisible security and
convinced that measures for the reduction and limitation of
strategic offensive arms and the other obligations set forth
in this Treaty will enhance predictability and stability, and
thus the security of both Parties,

- 2 -

Recognizing the existence of the interrelationship between strategic offensive arms and strategic defensive arms, that this interrelationship will become more important as strategic nuclear arms are reduced, and that current strategic defensive arms do not undermine the viability and effectiveness of the strategic offensive arms of the Parties,

Mindful of the impact of conventionally armed ICBMs and SLBMs on strategic stability,

Taking into account the positive effect on the world situation of the significant, verifiable reduction in nuclear arsenals at the turn of the 21st century,

Desiring to create a mechanism for verifying compliance with the obligations under this Treaty, adapted, simplified, and made less costly in comparison to the Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms of July 31, 1991, hereinafter referred to as the START Treaty,

Recognizing that the START Treaty has been implemented by the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation, Ukraine, and the United States of America, and that the reduction levels envisaged by the START Treaty were achieved,

Deeply appreciating the contribution of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, and Ukraine to nuclear disarmament and to strengthening international peace and security as non-nuclear-weapon states under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of July 1, 1968,

Welcoming the implementation of the Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions of May 24, 2002,

Have agreed as follows:

- 3 -

Article I

1. Each Party shall reduce and limit its strategic offensive arms in accordance with the provisions of this Treaty and shall carry out the other obligations set forth in this Treaty and its Protocol.
2. Definitions of terms used in this Treaty and its Protocol are provided in Part One of the Protocol.

Article II

1. Each Party shall reduce and limit its ICBMs and ICBM launchers, SLBMs and SLBM launchers, heavy bombers, ICBM warheads, SLBM warheads, and heavy bomber nuclear armaments, so that seven years after entry into force of this Treaty and thereafter, the aggregate numbers, as counted in accordance with Article III of this Treaty, do not exceed:
 - (a) 700, for deployed ICBMs, deployed SLBMs, and deployed heavy bombers;
 - (b) 1550, for warheads on deployed ICBMs, warheads on deployed SLBMs, and nuclear warheads counted for deployed heavy bombers;
 - (c) 800, for deployed and non-deployed ICBM launchers, deployed and non-deployed SLBM launchers, and deployed and non-deployed heavy bombers.
2. Each Party shall have the right to determine for itself the composition and structure of its strategic offensive arms.

- 4 -

Article III

1. For the purposes of counting toward the aggregate limit provided for in subparagraph 1(a) of Article II of this Treaty:

- (a) Each deployed ICBM shall be counted as one.
- (b) Each deployed SLBM shall be counted as one.
- (c) Each deployed heavy bomber shall be counted as one.

2. For the purposes of counting toward the aggregate limit provided for in subparagraph 1(b) of Article II of this Treaty:

(a) For ICBMs and SLBMs, the number of warheads shall be the number of reentry vehicles emplaced on deployed ICBMs and on deployed SLBMs.

(b) One nuclear warhead shall be counted for each deployed heavy bomber.

3. For the purposes of counting toward the aggregate limit provided for in subparagraph 1(c) of Article II of this Treaty:

- (a) Each deployed launcher of ICBMs shall be counted as one.
- (b) Each non-deployed launcher of ICBMs shall be counted as one.
- (c) Each deployed launcher of SLBMs shall be counted as one.
- (d) Each non-deployed launcher of SLBMs shall be counted as one.

- 5 -

(e) Each deployed heavy bomber shall be counted as one.

(f) Each non-deployed heavy bomber shall be counted as one.

4. For the purposes of this Treaty, including counting ICBMs and SLBMs:

(a) For ICBMs or SLBMs that are maintained, stored, and transported as assembled missiles in launch canisters, an assembled missile of a particular type, in its launch canister, shall be considered to be an ICBM or SLBM of that type.

(b) For ICBMs or SLBMs that are maintained, stored, and transported as assembled missiles without launch canisters, an assembled missile of a particular type shall be considered to be an ICBM or SLBM of that type.

(c) For ICBMs or SLBMs that are maintained, stored, and transported in stages, the first stage of an ICBM or SLBM of a particular type shall be considered to be an ICBM or SLBM of that type.

(d) Each launch canister shall be considered to contain an ICBM or SLBM from the time it first leaves a facility at which an ICBM or SLBM is installed in it, until an ICBM or SLBM has been launched from it, or until an ICBM or SLBM has been removed from it for elimination. A launch canister shall not be considered to contain an ICBM or SLBM if it contains a training model of a missile or has been placed on static display. Launch canisters for ICBMs or SLBMs of a particular type shall be distinguishable from launch canisters for ICBMs or SLBMs of a different type.

5. Newly constructed strategic offensive arms shall begin to be subject to this Treaty as follows:

(a) an ICBM, when it first leaves a production facility;

- 6 -

(b) a mobile launcher of ICBMs, when it first leaves a production facility;

(c) a silo launcher of ICBMs, when the silo door is first installed and closed;

(d) an SLBM, when it first leaves a production facility;

(e) an SLBM launcher, when the submarine on which that launcher is installed is first launched;

(f) a heavy bomber equipped for nuclear armaments, when its airframe is first brought out of the shop, plant, or building in which components of such a heavy bomber are assembled to produce complete airframes; or when its airframe is first brought out of the shop, plant, or building in which existing bomber airframes are converted to such heavy bomber airframes.

6. ICBMs, SLBMs, ICBM launchers, SLBM launchers, and heavy bombers shall cease to be subject to this Treaty in accordance with Parts Three and Four of the Protocol to this Treaty. ICBMs or SLBMs of an existing type shall cease to be subject to this Treaty if all ICBM or SLBM launchers of a type intended for such ICBMs or SLBMs have been eliminated or converted in accordance with Part Three of the Protocol to this Treaty.

7. For the purposes of this Treaty:

(a) A missile of a type developed and tested solely to intercept and counter objects not located on the surface of the Earth shall not be considered to be a ballistic missile to which the provisions of this Treaty apply.

(b) Within the same type, a heavy bomber equipped for nuclear armaments shall be distinguishable from a heavy bomber equipped for non-nuclear armaments.

- 7 -

(c) Heavy bombers of the same type shall cease to be subject to this Treaty or to the limitations thereof when the last heavy bomber equipped for nuclear armaments of that type is eliminated or converted, as appropriate, to a heavy bomber equipped for non-nuclear armaments in accordance with Part Three of the Protocol to this Treaty.

8. As of the date of signature of this Treaty:

(a) Existing types of ICBMs are:

(i) for the United States of America, the Minuteman II, Minuteman III, and Peacekeeper;

(ii) for the Russian Federation, the RS-12M, RS-12M2, RS-18, RS-20, and RS-24.

(b) Existing types of SLBMs are:

(i) for the Russian Federation, the RSM-50, RSM-52, RSM-54, and RSM-56;

(ii) for the United States of America, the Trident II.

(c) Existing types of heavy bombers are:

(i) for the United States of America, the B-52G, B-52H, B-1B, and B-2A;

(ii) for the Russian Federation, the Tu-95MS and Tu-160.

(d) Existing types of ICBM launchers and SLBM launchers are:

(i) for the Russian Federation, ICBM launchers RS-12M, RS-12M2, RS-18, RS-20, and RS-24; SLBM launchers RSM-50, RSM-52, RSM-54, and RSM-56;

- 8 -

(ii) for the United States of America, ICBM launchers Minuteman II, Minuteman III, and Peacekeeper; the SLBM launchers Trident II.

Article IV

1. Each Party shall base:
 - (a) deployed launchers of ICBMs only at ICBM bases;
 - (b) deployed heavy bombers only at air bases.
2. Each Party shall install deployed launchers of SLBMs only on ballistic missile submarines.
3. Each Party shall locate:
 - (a) non-deployed launchers of ICBMs only at ICBM bases, production facilities, ICBM loading facilities, repair facilities, storage facilities, conversion or elimination facilities, training facilities, test ranges, and space launch facilities. Mobile launchers of prototype ICBMs shall not be located at maintenance facilities of ICBM bases;
 - (b) non-deployed ICBMs and non-deployed SLBMs only at, as appropriate, submarine bases, ICBM or SLBM loading facilities, maintenance facilities, repair facilities for ICBMs or SLBMs, storage facilities for ICBMs or SLBMs, conversion or elimination facilities for ICBMs or SLBMs, test ranges, space launch facilities, and production facilities. Prototype ICBMs and prototype SLBMs, however, shall not be located at maintenance facilities of ICBM bases or at submarine bases.
4. Non-deployed ICBMs and non-deployed SLBMs as well as non-deployed mobile launchers of ICBMs may be in transit. Each Party shall limit the duration of each transit between facilities to no more than 30 days.

- 9 -

5. Test launchers of ICBMs or SLBMs may be located only at test ranges.

6. Training launchers may be located only at ICBM bases, training facilities, and test ranges. The number of silo training launchers located at each ICBM base for silo launchers of ICBMs shall not exceed one for each type of ICBM specified for that ICBM base.

7. Each Party shall limit the number of test heavy bombers to no more than ten.

8. Each Party shall base test heavy bombers only at heavy bomber flight test centers. Non-deployed heavy bombers other than test heavy bombers shall be located only at repair facilities or production facilities for heavy bombers.

9. Each Party shall not carry out at an air base joint basing of heavy bombers equipped for nuclear armaments and heavy bombers equipped for non-nuclear armaments, unless otherwise agreed by the Parties.

10. Strategic offensive arms shall not be located at eliminated facilities except during their movement through such facilities and during visits of heavy bombers at such facilities.

11. Strategic offensive arms subject to this Treaty shall not be based outside the national territory of each Party. The obligations provided for in this paragraph shall not affect the Parties' rights in accordance with generally recognized principles and rules of international law relating to the passage of submarines or flights of aircraft, or relating to visits of submarines to ports of third States. Heavy bombers may be temporarily located outside the national territory, notification of which shall be provided in accordance with Part Four of the Protocol to this Treaty.

- 10 -

Article V

1. Subject to the provisions of this Treaty, modernization and replacement of strategic offensive arms may be carried out.
2. When a Party believes that a new kind of strategic offensive arm is emerging, that Party shall have the right to raise the question of such a strategic offensive arm for consideration in the Bilateral Consultative Commission.
3. Each Party shall not convert and shall not use ICBM launchers and SLBM launchers for placement of missile defense interceptors therein. Each Party further shall not convert and shall not use launchers of missile defense interceptors for placement of ICBMs and SLBMs therein. This provision shall not apply to ICBM launchers that were converted prior to signature of this Treaty for placement of missile defense interceptors therein.

Article VI

1. Conversion, elimination, or other means for removal from accountability of strategic offensive arms and facilities shall be carried out in accordance with Part Three of the Protocol to this Treaty.
2. Notifications related to conversion, elimination, or other means for removal from accountability shall be provided in accordance with Parts Three and Four of the Protocol to this Treaty.
3. Verification of conversion or elimination in accordance with this Treaty shall be carried out by:

- 11 -

(a) national technical means of verification in accordance with Article X of this Treaty; and

(b) inspection activities as provided for in Article XI of this Treaty.

Article VII

1. A database pertaining to the obligations under this Treaty shall be created in accordance with Parts Two and Four of the Protocol to this Treaty. Categories of data for this database are set forth in Part Two of the Protocol to this Treaty.

2. Each Party shall notify the other Party about changes in data and shall provide other notifications in a manner provided for in Part Four of the Protocol to this Treaty.

3. Each Party shall use the Nuclear Risk Reduction Centers in order to provide and receive notifications, unless otherwise provided for in this Treaty.

4. Each Party may provide additional notifications on a voluntary basis, in addition to the notifications specified in paragraph 2 of this Article, if it deems this necessary to ensure confidence in the fulfillment of obligations assumed under this Treaty.

5. The Parties shall hold consultations within the framework of the Bilateral Consultative Commission on releasing to the public data and information obtained during the implementation of this Treaty. The Parties shall have the right to release to the public such data and information following agreement thereon within the framework of the Bilateral Consultative Commission. Each Party shall have the right to release to the public data related to its respective strategic offensive arms.

- 12 -

6. Geographic coordinates relating to data provided for in Part Two of the Protocol to this Treaty, unique identifiers, site diagrams of facilities provided by the Parties pursuant to this Treaty, as well as coastlines and waters diagrams provided by the Parties pursuant to this Treaty shall not be released to the public unless otherwise agreed by the Parties within the framework of the Bilateral Consultative Commission.

7. Notwithstanding paragraph 5 of this Article, the aggregate numbers of deployed ICBMs, deployed SLBMs, and deployed heavy bombers; the aggregate numbers of warheads on deployed ICBMs, deployed SLBMs, and nuclear warheads counted for deployed heavy bombers; and the aggregate numbers of deployed and non-deployed ICBM launchers, deployed and non-deployed SLBM launchers, and deployed and non-deployed heavy bombers, may be released to the public by the Parties.

Article VIII

In those cases in which one of the Parties determines that its actions may lead to ambiguous situations, that Party shall take measures to ensure the viability and effectiveness of this Treaty and to enhance confidence, openness, and predictability concerning the reduction and limitation of strategic offensive arms. Such measures may include, among other things, providing information in advance on activities of that Party associated with deployment or increased readiness of strategic offensive arms, to preclude the possibility of misinterpretation of its actions by the other Party. This information shall be provided through diplomatic or other channels.

- 13 -

Article IX

By mutual agreement of the Parties, telemetric information on launches of ICBMs and SLBMs shall be exchanged on a parity basis. The Parties shall agree on the amount of exchange of such telemetric information.

Article X

1. For the purpose of ensuring verification of compliance with the provisions of this Treaty, each Party undertakes:

(a) to use national technical means of verification at its disposal in a manner consistent with generally recognized principles of international law;

(b) not to interfere with the national technical means of verification of the other Party operating in accordance with this Article; and

(c) not to use concealment measures that impede verification, by national technical means of verification, of compliance with the provisions of this Treaty.

2. The obligation not to use concealment measures includes the obligation not to use them at test ranges, including measures that result in the concealment of ICBMs, SLBMs, ICBM launchers, or the association between ICBMs or SLBMs and their launchers during testing. The obligation not to use concealment measures shall not apply to cover or concealment practices at ICBM bases or to the use of environmental shelters for strategic offensive arms.

- 14 -

Article XI

1. For the purpose of confirming the accuracy of declared data on strategic offensive arms subject to this Treaty and ensuring verification of compliance with the provisions of this Treaty, each Party shall have the right to conduct inspection activities in accordance with this Article and Part Five of the Protocol to this Treaty.

2. Each Party shall have the right to conduct inspections at ICBM bases, submarine bases, and air bases. The purpose of such inspections shall be to confirm the accuracy of declared data on the numbers and types of deployed and non-deployed strategic offensive arms subject to this Treaty; the number of warheads located on deployed ICBMs and deployed SLBMs; and the number of nuclear armaments located on deployed heavy bombers. Such inspections shall hereinafter be referred to as Type One inspections.

3. Each Party shall have the right to conduct inspections at facilities listed in Section VII of Part Five of the Protocol to this Treaty. The purpose of such inspections shall be to confirm the accuracy of declared data on the numbers, types, and technical characteristics of non-deployed strategic offensive arms subject to this Treaty and to confirm that strategic offensive arms have been converted or eliminated.

In addition, each Party shall have the right to conduct inspections at formerly declared facilities, which are provided for in Part Two of the Protocol to this Treaty, to confirm that such facilities are not being used for purposes inconsistent with this Treaty.

The inspections provided for in this paragraph shall hereinafter be referred to as Type Two inspections.

4. Each Party shall conduct exhibitions and have the right to participate in exhibitions conducted by the other Party. The

- 15 -

purpose of such exhibitions shall be to demonstrate distinguishing features and to confirm technical characteristics of new types, and to demonstrate the results of conversion of the first item of each type of strategic offensive arms subject to this Treaty.

Article XIII

To promote the objectives and implementation of the provisions of this Treaty, the Parties hereby establish the Bilateral Consultative Commission, the authority and procedures for the operation of which are set forth in Part Six of the Protocol to this Treaty.

Article XIII

To ensure the viability and effectiveness of this Treaty, each Party shall not assume any international obligations or undertakings that would conflict with its provisions. The Parties shall not transfer strategic offensive arms subject to this Treaty to third parties. The Parties shall hold consultations within the framework of the Bilateral Consultative Commission in order to resolve any ambiguities that may arise in this regard. This provision shall not apply to any patterns of cooperation, including obligations, in the area of strategic offensive arms, existing at the time of signature of this Treaty, between a Party and a third State.

- 16 -

Article XIV

1. This Treaty, including its Protocol, which is an integral part thereof, shall be subject to ratification in accordance with the constitutional procedures of each Party. This Treaty shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

2. This Treaty shall remain in force for 10 years unless it is superseded earlier by a subsequent agreement on the reduction and limitation of strategic offensive arms. If either Party raises the issue of extension of this Treaty, the Parties shall jointly consider the matter. If the Parties decide to extend this Treaty, it will be extended for a period of no more than five years unless it is superseded earlier by a subsequent agreement on the reduction and limitation of strategic offensive arms.

3. Each Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty if it decides that extraordinary events related to the subject matter of this Treaty have jeopardized its supreme interests. It shall give notice of its decision to the other Party. Such notice shall contain a statement of the extraordinary events the notifying Party regards as having jeopardized its supreme interests. This Treaty shall terminate three months from the date of receipt by the other Party of the aforementioned notice, unless the notice specifies a later date.

4. As of the date of its entry into force, this Treaty shall supersede the Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions of May 24, 2002, which shall terminate as of that date.

- 17 -

Article XV

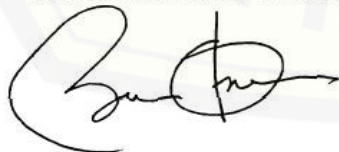
1. Each Party may propose amendments to this Treaty. Agreed amendments shall enter into force in accordance with the procedures governing entry into force of this Treaty.
2. If it becomes necessary to make changes in the Protocol to this Treaty that do not affect substantive rights or obligations under this Treaty, the Parties shall use the Bilateral Consultative Commission to reach agreement on such changes, without resorting to the procedure for making amendments that is set forth in paragraph 1 of this Article.

Article XVI

This Treaty shall be registered pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Done at Prague, this eighth day of April, 2010, in two originals, each in the English and Russian languages, both texts being equally authentic.

FOR THE
UNITED STATES OF AMERICA:



FOR THE
RUSSIAN FEDERATION:



PROTOCOL TO THE TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER
REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

Pursuant to Article I of the Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, hereinafter referred to as the Treaty, the Parties hereby agree upon the following provisions regarding implementation of the Treaty.

This Protocol is organized into ten Parts.

Part One, Terms and Their Definitions, contains the definitions of terms that are used in the Treaty and this Protocol.

Part Two, Categories of Data Pertaining to Strategic Offensive Arms, contains the categories of data with respect to items subject to the Treaty.

Part Three, Conversion or Elimination Procedures, contains procedures governing the conversion, elimination, or other means for removal from accountability of strategic offensive arms and facilities.

Part Four, Notifications, contains the list of notifications provided for in Article VII of the Treaty.

Part Five, Inspection Activities, contains provisions governing the conduct of inspection activities provided for in Article XI of the Treaty.

Part Six, Bilateral Consultative Commission, hereinafter referred to as the BCC, contains provisions governing the operation of the BCC, established pursuant to Article XII of the Treaty.

Part Seven, Telemetric Information, contains the procedures associated with the fulfillment of obligations concerning telemetric information, pursuant to Article IX of the Treaty.

Part Eight, Provisional Application, governs provisional application of certain provisions of the Treaty and this Protocol.

Part Nine, Agreed Statements, contains Agreed Statements regarding the Treaty and this Protocol.

Part Ten, Final Provisions, contains general provisions applicable to this Protocol.

- 98 -

Section VI. Other Means for Removal from Accountability

1. A strategic offensive arm shall cease to be subject to the Treaty if:

(a) A strategic offensive arm is lost as a result of an accident or is disabled beyond repair;

(b) A strategic offensive arm is placed on static display;

(c) A heavy bomber is converted for use as a ground trainer; or

(d) An ICBM or SLBM is eliminated by launch, static testing, or static firing.

2. Prior to the placement of a strategic offensive arm on static display or prior to the use of a heavy bomber as a ground trainer, such a strategic offensive arm shall be rendered inoperable.

3. An ICBM or SLBM shall cease to be subject to the Treaty on the date of the launch, static testing, or static firing as specified in the notification.

Section VII. Procedures for Elimination of Facilities

1. The elimination of declared facilities shall be subject to verification by national technical means of verification and shall be carried out by removal or elimination of all strategic offensive arms specified for such a facility, as well as training models of missiles, training launchers, fixed structures for mobile launchers of ICBMs, launch-associated vehicles, and driver training vehicles.

2. The elimination process for fixed structures for mobile launchers of ICBMs shall be carried out by dismantling and removing the superstructure of the fixed structure from the

-97-

3. The conversion process for a heavy bomber equipped for nuclear armaments to a heavy bomber equipped for non-nuclear armaments shall be carried out using any of the procedures provided for in this paragraph:

(a) All weapons bays and all external attachments for pylons shall be modified so as to render them incapable of employing nuclear armaments;

(b) All internal and external launcher assemblies shall be modified so as to render them incapable of employing nuclear armaments; or

(c) Other procedures that are developed by the Party carrying out the conversion.

4. Upon completion of the conversion procedures in accordance with paragraph 3 of this Section and provision of notification thereof, the converted heavy bomber shall not be flown but shall be moved directly to the viewing site at the facility at which the conversion was carried out. The Party receiving such notification shall have the right, within a 30-day period beginning on the date of provision of notification, to conduct an inspection of the converted heavy bomber in order to confirm that the procedures provided for in paragraph 3 of this Section have been completed. The converted heavy bomber shall remain at the viewing site at the facility at which the conversion was carried out until an inspection is completed, or, if an inspection was not conducted, until expiration of the 30-day period. Upon completion of the inspection, or, if an inspection was not conducted, upon expiration of the 30-day period, the heavy bomber shall be considered to be converted.

-96-

(b) Critical components required to launch an SLBM shall be removed. Such critical components may include, among other things, gas generators and launch-related subsystems; or

(c) Other procedures that are developed by the Party carrying out the conversion.

7. Upon completion of the conversion procedures in accordance with paragraph 6 of this Section and provision of notification thereof, the submarine shall be made available for viewing upon return to the submarine base. The Party receiving such notification shall have the right, within a 30-day period beginning on the date of provision of notification, to conduct an inspection of the converted launcher of SLBMs in order to confirm that the procedures provided for in paragraph 6 of this Section have been completed. The submarine shall remain at the submarine base until an inspection is completed, or, if an inspection was not conducted, until expiration of the 30-day period. Upon completion of the inspection, or, if an inspection was not conducted, upon expiration of the 30-day period, the SLBM launcher shall be considered to be converted.

Section V. Procedures for Conversion or Elimination of Heavy Bombers

1. The elimination of a heavy bomber shall be carried out by cutting a wing or tail section from the fuselage at locations obviously not assembly joints, or by cutting the fuselage into two parts at a location obviously not an assembly joint.

2. A heavy bomber shall remain visible to national technical means of verification during the entire elimination process and for a 60-day period following provision of notification of the completion of the elimination. Upon expiration of the 60-day period, the heavy bomber shall cease to be subject to the Treaty.

-95-

Section IV. Procedures for Conversion or Elimination of SLBM Launchers

1. The elimination of SLBM launchers shall be carried out by removing all missile launch tube hatches, their associated superstructure fairings, and, if applicable, gas generators.
2. Upon completion of the procedures provided for in paragraph 1 of this Section and provision of notification thereof, the SLBM launchers shall cease to be subject to the Treaty.
3. A submarine on which SLBM launchers have been eliminated in accordance with paragraph 1 of this Section shall remain visible to national technical means of verification for a 60-day period following provision of notification.
4. Upon expiration of the 60-day period provided for in paragraph 3 of this Section, scrapping of the submarine shall be carried out at the facility at which it is located, or the submarine may be moved for this purpose to another declared facility, notification of which shall be provided. After provision of notification of the completion of scrapping, the submarine shall cease to be subject to the Treaty.
5. Conversion of an SLBM launcher to a launcher of SLBMs of another type shall be carried out using procedures developed by the Party carrying out the conversion. Upon completion of the conversion procedures and provision of notification thereof, the converted launcher of SLBMs shall be considered to be a launcher of SLBMs of the other type.
6. Conversion of an SLBM launcher that precludes its use as an SLBM launcher shall be carried out using any of the procedures provided for in this paragraph:
 - (a) The height or diameter of the launcher shall be reduced so that the launcher can no longer contain the smallest SLBM deployed by the Party carrying out the conversion;

- 94 -

means of verification, shall be painted so that they are distinguishable from the upper surfaces of a deployed mobile launcher of ICBMs.

6. Upon completion of the elimination procedure in accordance with paragraph 4 of this Section and provision of notification thereof, the eliminated mobile launcher of ICBMs shall remain visible to national technical means of verification for a 60-day period. The Party receiving such notification shall have the right, within a 30-day period beginning on the date of provision of notification, to conduct an inspection of the eliminated mobile launcher of ICBMs. If a Party accumulates eliminated mobile launchers of ICBMs, the specified launchers shall cease to be subject to the Treaty, with the exception of the provisions of paragraph 5 of this Section, upon completion of the inspection or, if an inspection was not conducted, upon expiration of the 30-day period. Eliminated mobile launchers of ICBMs that have not been accumulated shall cease to be subject to the Treaty, with the exception of the provisions of paragraph 5 of this Section, upon completion of the inspection or, if an inspection was not conducted, upon expiration of the 60-day period.

7. Upon completion of the elimination process for the mobile launcher of ICBMs, the vehicle may be used for purposes not inconsistent with the Treaty.

8. Conversion of an ICBM launcher to a launcher of ICBMs of another type shall be carried out using procedures developed by the Party carrying out the conversion. Upon completion of the conversion procedures and provision of notification thereof, the converted launcher of ICBMs shall be considered to be a launcher of ICBMs of the other type.

-93-

2. The elimination of silo launchers of ICBMs shall be carried out using any of the procedures provided for in this paragraph:

(a) The silo door shall be removed, dismantled, or destroyed, and the silo headworks and the silo shall be destroyed by excavating them to a depth of no less than eight meters or by explosion to a depth of no less than six meters;

(b) The silo door shall be removed, dismantled, or destroyed and the silo shall be completely filled with debris resulting from demolition of infrastructure, and with earth or gravel. The silo door shall not be reinstalled; or

(c) Other procedures that are developed by the Party carrying out the elimination.

3. Upon completion of the elimination procedures in accordance with paragraph 2 of this Section and provision of notification thereof, the area where the eliminated silo launcher of ICBMs was located may be graded after expiration of the 60-day period. The Party receiving such notification shall have the right, within a 30-day period beginning on the date of provision of notification, to conduct an inspection of the eliminated silo launcher of ICBMs. Upon expiration of the 60-day period following provision of such notification or upon completion of the inspection, the silo launcher of ICBMs shall cease to be subject to the Treaty.

4. The elimination of mobile launchers of ICBMs shall be carried out by cutting the erector-launcher mechanism, leveling supports, and mountings of the erector-launcher mechanism from the launcher chassis and by removing the missile launch support equipment, including external instrumentation compartments, from the launcher chassis.

5. If the chassis of the eliminated mobile launcher of ICBMs is used at a declared facility for purposes not inconsistent with the Treaty, the upper surfaces of the vehicle and of the items mounted on the chassis, visible to national technical

-92-

of notification thereof, the eliminated solid-fueled ICBMs and solid-fueled SLBMs shall remain visible to national technical means of verification for a 60-day period. The Party receiving such notification shall have the right, within a 30-day period beginning on the date of provision of notification, to conduct an inspection of the eliminated solid-fueled ICBMs and solid-fueled SLBMs. If a Party accumulates eliminated solid-fueled ICBMs and solid-fueled SLBMs, the specified eliminated solid-fueled ICBMs and solid-fueled SLBMs shall cease to be subject to the Treaty upon completion of the inspection or, if the inspection was not conducted, upon expiration of the 30-day period. Eliminated solid-fueled ICBMs and solid-fueled SLBMs that have not been accumulated shall cease to be subject to the Treaty upon completion of the inspection or, if an inspection was not conducted, upon expiration of the 60-day period.

4. The elimination of launch canisters for ICBMs and SLBMs shall be carried out by separating the launch canister into two parts. Upon completion of the elimination procedure and provision of notification thereof, the parts of the launch canister for ICBMs and SLBMs shall remain visible to national technical means of verification at the declared facility for a 60-day period. Upon expiration of the 60-day period, the launch canister shall be considered to be eliminated.

5. Upon completion of the elimination process for launch canisters for ICBMs and SLBMs, the launch canisters may be used for purposes not inconsistent with the Treaty but shall not be transferred to a third party.

Section III. Procedures for Conversion or Elimination of ICBM Launchers

1. A silo launcher of ICBMs shall remain visible to national technical means of verification during the entire elimination process and for a 60-day period following provision of notification of the completion of the elimination process.

-91-

conversion or elimination of that type of strategic offensive arm.

5. Upon completion of conversion of the first item of a type of strategic offensive arm subject to the Treaty, the Party carrying out the conversion shall conduct an exhibition in accordance with Article XI of the Treaty.

6. The results of conversion or elimination of strategic offensive arms and facilities subject to the Treaty may be confirmed in accordance with Articles X and XI of the Treaty.

Section II. Procedures for Elimination of ICBMs and SLBMs

1. Procedures for elimination of liquid-fueled ICBMs or liquid-fueled SLBMs shall be determined by the Party carrying out the elimination. Upon completion of the elimination procedures, notification thereof shall be provided.

2. The elimination of solid-fueled ICBMs and solid-fueled SLBMs shall be carried out using any of the procedures provided for in this paragraph:

(a) If the first stage is destroyed by explosion, notification thereof shall be provided.

(b) If the fuel is removed by burning, the first stage rocket motor case shall have a hole, no less than one meter in diameter, cut or punched through the case along the lateral surface, or the first stage rocket motor case shall be cut into two parts of approximately equal size.

(c) If the fuel is removed by washing, the first stage rocket motor case shall be crushed, flattened, or cut into two parts of approximately equal size.

3. Upon completion of the elimination procedure in accordance with subparagraph 2(b) or 2(c) of this Section and provision

-90-

PART THREE - CONVERSION OR ELIMINATION PROCEDURES

Section I. General Provisions

1. Conversion or elimination of strategic offensive arms subject to the Treaty shall be carried out *in situ* or at declared facilities.
2. Elimination of strategic offensive arms subject to the Treaty shall be carried out by rendering them inoperable, precluding their use for their original purpose. Upon completion of elimination, an eliminated strategic offensive arm shall cease to be subject to the Treaty.
3. If an ICBM launcher or SLBM launcher is converted to a launcher of ICBMs or a launcher of SLBMs of another type, it shall be considered to be a launcher of ICBMs or a launcher of SLBMs of the type to which it was converted. If an ICBM launcher, SLBM launcher, or heavy bomber is converted by rendering it incapable of employing ICBMs, SLBMs, or nuclear armaments, so that the other Party can confirm the results of the conversion, such a converted strategic offensive arm shall cease to be subject to the aggregate numbers provided for in Article II of the Treaty and may be used for purposes not inconsistent with the Treaty.
4. If one of the Parties decides to carry out a conversion or elimination of a type of strategic offensive arm subject to the Treaty using procedures that it developed in accordance with this Part, it shall notify the other Party of such procedures in accordance with Part Four of this Protocol. If, in the opinion of the other Party, the procedures developed by the Party carrying out the conversion or elimination are ambiguous or do not achieve the goals set forth in paragraph 2 or 3 of this Section, the Party carrying out the conversion or elimination shall conduct a demonstration, within the framework of the BCC, of the procedures that it developed. After the demonstration, such procedures shall be recorded within the framework of the BCC and may be used thereafter for

- 99 -

facility. No structure or covering, permanent or temporary, shall be reinstalled or built over the remaining foundation.

3. The declared facility shall be considered to be eliminated following completion of the procedures provided for in paragraphs 1 and 2 of this Section and provision of notification thereof.

-141-

PART SIX - BILATERAL CONSULTATIVE COMMISSION

Section I. Authority of the Bilateral Consultative Commission (BCC)

To promote the implementation of the provisions of the Treaty, the Parties within the framework of the BCC shall:

- (a) Resolve questions relating to compliance with the obligations assumed by the Parties.
- (b) Agree upon such additional measures as may be necessary to improve the viability and effectiveness of the Treaty.
- (c) Discuss the unique features of missiles and their launchers, other than ICBMs and ICBM launchers, or SLBMs and SLBM launchers, referred to in paragraph 3 of Article V of the Treaty, that distinguish such missiles and their launchers from ICBMs and ICBM launchers, or SLBMs and SLBM launchers.
- (d) Resolve questions related to the applicability of provisions of the Treaty to a new kind of strategic offensive arm.
- (e) Discuss other issues raised by either Party.

Section II. Composition

1. Each Party shall communicate to the other Party through diplomatic channels the names of its designated Commissioner and Deputy Commissioner to the BCC.
2. Each Party shall have the right to be represented at a session of the BCC by its Commissioner and Deputy Commissioner as well as by their alternates, members, advisors, and experts. A session of the BCC may be convened without the

-142-

participation of the Commissioner and Deputy Commissioner. In such a case, any other individual provided for in this paragraph may be the head representative of the Party to a session of the BCC.

3. The BCC shall have the right to constitute working groups consisting of any of the individuals provided for in paragraph 2 of this Section for the consideration of specific questions raised in the BCC.

Section III. Convening a Session

1. A session of the BCC shall be convened at the request of either Party. No later than 15 days after receiving such a request, the requested Party shall submit a response. Requests and responses shall include the following:

(a) The questions that the Party intends to raise.

(b) The name of the Commissioner, Deputy Commissioner, or the head representative of the Party.

(c) The proposed, accepted or alternate date and location for the convening of the session.

Each Party may also submit additional questions to the other Party prior to the convening of the session.

No fewer than two sessions of the BCC shall be convened each year, unless otherwise agreed.

2. A session of the BCC shall be convened not later than 45 days after the date proposed in the request provided for in paragraph 1 of this Section.

3. A session of the BCC shall be convened in Geneva, Switzerland, and shall remain in session for no more than 15 days, unless otherwise agreed.

-143-

4. The Commissioners of the Parties may communicate with each other during the intersessional period in order to clarify any unclear situations or to resolve questions.

Section IV. Agenda

1. The agenda for a session of the BCC shall consist of those questions that the Parties have specified in the communications provided to each other in accordance with paragraph 1 of Section III of this Part.

2. Each Party shall have the right to raise in the BCC questions that arise during a session of the BCC, provided, however, that consideration of such questions during the current session requires agreement of the Parties. In case of such agreement, the Parties shall allow sufficient time prior to consideration of such questions for preparation and for any changes in the composition of their delegations.

Section V. Work of the BCC

The work of the BCC shall be confidential, except as otherwise agreed by the BCC. The BCC may record agreements reached or the results of its work in an appropriate document, which shall be done in two originals, each in the English and Russian languages, both texts being equally authentic. Such documents shall not be confidential, except as otherwise agreed by the BCC.

Section VI. Costs

Each Party shall bear the cost of its participation in the work of the BCC.

-144-

Section VII. Communications

Communications in accordance with this Part shall be provided through diplomatic channels or through the Nuclear Risk Reduction Centers of the Parties.

Section VIII. Additional Procedures

The Parties shall have the right to agree upon additional procedures governing the operation of the BCC.